HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
27 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

SABTU, 14 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 17

OPINI

Ketika Rasio Melayani Identitas: Membaca Loyalitas Pendukung Jokowi

Oleh Lukman Nul Hakim · 14 Nov, 14.10 WIB



Ilustrasi mendalam yang menggambarkan kompleksitas lanskap politik Indonesia dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Gambar ini menyoroti keterkaitan antara kepemimpinan, arus informasi, dan identitas sosial.

Oleh: Dr. Lukman Nul Hakim((Dr. Lukman Nul Hakim adalah ilmuwan psikologi dan pengajar kepemimpinan dan manajemen pendidikan))

AMIS, 12 November 2026, menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR. Ia menjadi wakil presiden pertama sejak Reformasi 1998 yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai.

Langkah tersebut diambil setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menganulir keabsahan dokumen penyetaraan ijazah sekolah menengahnya, yang ia tempuh di luar negeri. Padahal, dokumen itu merupakan syarat pencalonan wakil presiden. Wacana pemakzulan pun mulai bergulir di parlemen. Dalam pernyataan perpisahannya, Gibran menegaskan bahwa keputusan itu bersifat pribadi, tidak berkaitan dengan ijazah, dan seluruh dokumen pendidikannya lengkap.

Menurut saya, peristiwa ini tidak cukup dibaca sebagai nasib seorang Gibran. Gibran merupakan representasi "geng Solo", yaitu jejaring keluarga, relawan, dan loyalis yang tumbuh bersama karier politik Joko Widodo sejak ia menjadi wali kota Solo, lalu ikut naik ke panggung nasional.

Selengkapnya di halaman 24 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

GMNI Desak DPR Bentuk Pansus Penyadapan, Minta Jokowi dan Listyo Sigit Diproses Hukum



BANDA ACEH - Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) mengeluarkan tuntutan Politik dan hukum terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta penyadapan ilegal yang dinilai mengancam kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.Dalam pernyataan sikap bertajuk "Darurat Republik: Adili Jokowi, Sigit, dan Kroninya", DPD GMNI mendesak agar Joko Widodo …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bukan Lewat Koneksi, Prabowo Bongkar Cara Rahasia Pilih Kapolri!



BANDA ACEH - Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan proses di balik penunjukan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Dia mengakui tidak mengenal dekat Suyudi dan hanya bertemu sekali dalam belasan tahun terakhir.Hal ini disampaikan Prabowo ketika menyapa sejumlah pejabat negara dalam acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 20
INTERNASIONAL 22
OPINI 24
Aneka Berita 26

NASIONAL

Luhut Pandjaitan Menguat sebagai Calon Pengganti Gibran di Kursi Wapres



BANDA ACEH – Di tengah proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 12 November 2026, nama Luhut Binsar Pandjaitan kembali mencuat dalam spekulasi Politik nasional.Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus mantan Menko Marves itu disebut-sebut masuk radar sebagai salah …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Belum Puas Gibran Mundur, DPR Mau Masalah Pencalonannya Diusut Tuntas



BANDA ACEH - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI dinilai belum otomatis menutup berbagai persoalan konstitusional yang selama ini menjadi sorotan publik.Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino dan Yanuar Arif Wibowo, menegaskan bahwa pengawasan serta tindak lanjut atas persoalan tersebut tetap …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

39 BERITA

NASIONAL

Luhut Pandjaitan Menguat sebagai Calon Pengganti Gibran di Kursi Wapres

Oleh Redaksi · 14 Nov, 20.23 WIB



BANDA ACEH – Di tengah proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 12 November 2026, nama Luhut Binsar Pandjaitan kembali mencuat dalam spekulasi Politik nasional.Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus mantan Menko Marves itu disebut-sebut masuk radar sebagai salah satu calon yang potensial diajukan Presiden Prabowo Subianto ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Istana atau partai koalisi, sejumlah kalangan menilai pengalaman panjang Luhut di pemerintahan Jokowi dan kedekatannya dengan Prabowo menjadi pertimbangan.

Konteks Pengunduran Diri Gibran

Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wapres masa bakti 2024–2029 “atas permintaan sendiri”. MPR telah menerima surat tersebut dan menetapkan sidang paripurna untuk pemilihan, pelantikan, serta pengesahan Wapres pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026.

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua nama calon kepada MPR, yang kemudian memilih salah satunya. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan tidak ada ketentuan konstitusi yang mewajibkan calon berasal dari partai politik koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Mengapa Nama Luhut Muncul?

Luhut sebelumnya aktif membela Gibran di tengah isu pemakzulan terkait polemik ijazah. Ia menyatakan bahwa jika Gibran dimakzulkan, akan ada reaksi karena keduanya dicalonkan bersama Prabowo. Ia juga menegaskan Gibran telah melalui proses verifikasi KPU dan memiliki ijazah setara SMA yang sah.

Sebagai Ketua DEN, Luhut saat ini berperan memberi masukan strategis soal ekonomi, investasi, dan hilirisasi—isu yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Pengalaman sebagai Menko Marves, Kepala Staf Kepresidenan, serta rekam jejak di bidang pertahanan (sebagai purnawirawan jenderal) membuatnya dianggap mampu menjaga stabilitas pemerintahan di sisa masa jabatan 2024–2029.

Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi bahwa Luhut masuk daftar dua nama yang akan disetorkan Prabowo. Nama-nama yang lebih sering beredar dari berbagai sumber justru meliputi kader Gerindra seperti Sugiono dan Sufmi Dasco Ahmad, serta tokoh lain seperti Puan Maharani, AHY, dan Ahmad Muzani.

Reaksi dan Proses Selanjutnya

Partai-partai koalisi, termasuk PAN, menyerahkan sepenuhnya penentuan dua nama kepada Presiden Prabowo. Prabowo telah memberi waktu bagi partai untuk berdiskusi internal.

MPR telah mengirim surat meminta Prabowo segera mengajukan dua nama.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Belum Puas Gibran Mundur, DPR Mau Masalah Pencalonannya Diusut Tuntas

Oleh Redaksi · 14 Nov, 19.35 WIB



BANDA ACEH - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI dinilai belum otomatis menutup berbagai persoalan konstitusional yang selama ini menjadi sorotan publik.Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino dan Yanuar Arif Wibowo, menegaskan bahwa pengawasan serta tindak lanjut atas persoalan tersebut tetap perlu dikawal melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Keduanya menyampaikan pandangan tersebut setelah mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai tidak ditemukannya dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran dan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Yanuar Arif Wibowo menilai perjalanan Gibran sejak proses pencalonan hingga menjabat sebagai Wakil Presiden memang menjadi catatan penting bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Ia menegaskan bahwa generasi muda tetap harus memperoleh kesempatan untuk berkiprah dalam pemerintahan. Namun, kesempatan tersebut harus ditempuh melalui jalur dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Yanuar juga menilai persoalan administratif yang berujung pada putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Ia berharap polemik tersebut bisa menjadi pelajaran agar proses Politik dan ketatanegaraan ke depan berjalan sesuai aturan.

“Kasus wapres kita ini kan, mulai dari pencalonannya sampai menjabat dua tahun, itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya polemik. Nah, ini menjadi catatan penting buat generasi kita ke depan. Boleh anak muda berkarya, beri kesempatan untuk membangun bangsa ini, tapi dengan track yang benar, melalui jalur yang benar,” ungkap Yanuar.

Senada, Harris menilai masih terdapat proses konstitusional yang perlu mendapat perhatian meskipun Gibran telah mengajukan pengunduran diri. Ia mengingatkan agar konstitusi tidak diperlakukan secara fleksibel hanya untuk mengakomodasi kepentingan individu maupun keluarga tertentu.

“Masih ada proses konstitusional yang harus kita kawal sampai tuntas. Konstitusi tidak boleh ditekak-tekuk untuk kepentingan seseorang. Untuk kepentingan satu keluarga,” kata Harris.

Diberitakan sebelumnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden terhitung sejak 12 November 2026. Ia menegaskan keputusan tersebut merupakan pilihan pribadinya dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini turut menjadi sorotan.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

MPR Resmi Surati Prabowo, Dua Nama Pengganti Gibran Diminta Segera Disetor

Oleh Van · 13 Nov, 19.46 WIB

JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta

Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam keterangan resminya Jumat, (13/11/2026) mengatakan, surat tersebut akan dikirim pada hari yang sama. Dua nama yang diajukan Prabowo nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR sebelum memasuki tahapan pemilihan.

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segara menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," kata Muzani.

Selain meminta dua nama kandidat, rapat gabungan tersebut juga menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan wakil presiden baru.

Muzani menyampaikan seluruh rangkaian proses tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 2026, di gedung Senayan ini," imbuh Muzani.

Dengan keputusan tersebut, proses pengisian jabatan wakil presiden mulai memasuki tahapan kelembagaan di MPR. Setelah menerima dua nama dari Presiden, tim verifikasi akan memeriksa persyaratan masing-masing kandidat sebelum pemilihan dilaksanakan.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis (12/11/2026).

Presiden Prabowo Subianto juga telah resmi menerima pengunduran diri tersebut. Kondisi ini membuat proses penentuan pengganti Gibran menjadi agenda yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.(*)

NASIONAL

Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Rizal Fadillah Meninggal Dunia

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.32 WIB



BANDA ACEH - Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi, Rizal Fadillah meninggal dunia, Jumat (13/11/2026). Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) tersebut mengembuskan napas terakhir pukul 17.15 WIB.

Kabar duka tersebut diterima dari mantan Kapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Rizal meninggal di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Bandung.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Cak Imin Lega Foto Gibran Dicopot dari Markas PKB

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.25 WIB

BANDA ACEH -Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akhirnya bisa bernapas lega setelah foto Wakil Presiden ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka dicopot dari kantor DPP PKB.

Cerita itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam Dialog Publik PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Mulanya, Cak Imin berbicara mengenai pengalamannya mendukung pendirian Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengaku terkadang kecewa terhadap putusan lembaga tersebut, tetapi pada kesempatan lain juga merasa puas.

"Jadi, kalau ada kecewa ada puas berarti benar, MK organisasi yang benar gitu. Tapi kalau puas terus atau kecewa terus, berarti ya tidak benar. Jadi kadang kecewa, kadang senang," kata Cak Imin.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

GMNI Desak DPR Bentuk Pansus Penyadapan, Minta Jokowi dan Listyo Sigit Diproses Hukum

Oleh Redaksi · 14 Nov, 19.49 WIB



BANDA ACEH - Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) mengeluarkan tuntutan Politik dan hukum terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta penyadapan ilegal yang dinilai mengancam kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.Dalam pernyataan sikap bertajuk "Darurat Republik: Adili Jokowi, Sigit, dan Kroninya", DPD GMNI mendesak agar Joko Widodo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta pihak-pihak yang disebut terlibat dalam dugaan penyalahgunaan kekuasaan diproses melalui mekanisme hukum yang terbuka dan transparan.

Selain itu, GMNI secara khusus meminta DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan instrumen negara.

Ketua DPD GMNI, Deodatus Sunda Se atau Dendy Se, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan politik antarkelompok, tetapi harus menjadi perhatian serius dalam menjaga konstitusi dan mekanisme demokrasi.

Dalam pernyataan sikapnya yang diterima redaksi mediaindonesianews, Sabtu (14/11/2026), GMNI menyoroti dugaan penyadapan ilegal, persekongkolan kekuasaan, serta praktik politik dinasti yang menurut organisasi tersebut berpotensi merusak prinsip demokrasi dan mekanisme pengawasan antarlembaga negara.

GMNI juga menilai fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu diperkuat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa negara harus kembali menjalankan mandat konstitusi untuk melayani kepentingan rakyat, khususnya masyarakat kecil atau kaum Marhaen, bukan menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan segelintir pihak.

Dalam tuntutannya, DPD GMNI menyampaikan empat poin utama.

Pertama, mendesak proses hukum terhadap Joko Widodo, Listyo Sigit Prabowo, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan.
GMNI meminta tidak ada kekebalan politik dalam penegakan hukum.

Kedua, mendesak DPR RI segera membentuk Pansus Penyadapan guna mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan alat negara.

Ketiga, meminta pembersihan lembaga negara dari praktik penyalahgunaan kekuasaan serta mengembalikan fungsi mekanisme checks and balances agar lembaga negara bekerja sesuai konstitusi.

Keempat, mendesak pengembalian kedaulatan kepada rakyat melalui tata kelola pemerintahan yang berlandaskan Pancasila, keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan semangat gotong royong.

GMNI juga mengajak mahasiswa, aktivis, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan.

Menurut organisasi tersebut, gerakan mahasiswa tidak boleh hanya hadir ketika terjadi krisis, tetapi harus konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bukan Lewat Koneksi, Prabowo Bongkar Cara Rahasia Pilih Kapolri!

Oleh Redaksi · 14 Nov, 20.14 WIB



BANDA ACEH - Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan proses di balik penunjukan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Dia mengakui tidak mengenal dekat Suyudi dan hanya bertemu sekali dalam belasan tahun terakhir.Hal ini disampaikan Prabowo ketika menyapa sejumlah pejabat negara dalam acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

"Saudara-saudara, saya, orang bingung, dari mana ya saya, kadang-kadang saya hanya dengar ada suara enggak tahu dari mana. Saya tanya, dari mana saya kenal Saudara Suyudi ini? Jenderal Suyudi. Saya enggak kenal. Saya enggak kenal," kata Prabowo.

Prabowo mengingat pernah bertemu Suyudi ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kapolres. Saat itu, Prabowo mengaku sudah berpangkat jenderal sehingga pertemuan mereka hanya berlangsung sepintas.

"Saya ketemu sekali dalam sekian belas tahun, ya kan? Saya lihat dulu ada Polres, Kapolres ya gitu. Dia Kapolres, aku sudah jenderal, dia masih apa. Ya kan? Kalau jenderal itu kalau lihat letnannya itu kadang-kadang sepintas aja," ujarnya.

Prabowo kemudian mengungkapkan proses pemilihan Kapolri. Ia mengaku sempat menerima sejumlah nama calon pengganti Kapolri, tetapi belum menemukan sosok yang dirasa cocok.

"Pandeglang, Banten. Itu aja. Habis itu, kau Kapolri!" ungkap Prabowo.

Prabowo menyebut keputusan tersebut sebagai sesuatu yang datang melalui petunjuk yang ia istilahkan sebagai suara dari atas. Ia pun mengaku bersyukur atas keputusannya memilih Suyudi.

"Jadi suara dari atas itu. Jadi alhamdulillah negara terselamatkan," ucapnya.

Prabowo lantas menegaskan dirinya bukan sosok yang mudah memberikan pujian kepada orang lain. Namun, ia merasa perlu menyampaikan penilaian positif apabila seseorang memang layak mendapatkannya.

"Saya bukan memuji-memuji orang ya, saya ini orang yang sangat apa itu, sulit memuji ya, mahal kalau memuji, saya tidak gampang muji. Tapi saya harus akui," tuturnya.

Prabowo menutup ceritanya dengan menekankan pentingnya menyampaikan sesuatu secara objektif, termasuk mengakui hal yang benar maupun salah meski harus menghadapi risiko.

Presiden RI Prabowo Subianto ketika menyapa sejumlah pejabat negara dalam acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden.

NASIONAL

Golkar Sarankan Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra untuk Cegah Konflik Antarpartai

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.42 WIB

BANDA ACEH - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyarankan agar posisi Wakil Presiden (Wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka diisi oleh kader internal Partai Gerindra atau sosok nonpartisan.

Opsi tersebut dinilai lebih tepat untuk menjaga stabilitas Politik dan menghindari potensi gesekan di antara partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Idrus, pengisian jabatan wakil presiden tidak semata-mata berkaitan dengan penentuan figur pengganti. Lebih dari itu, proses tersebut harus mampu menjaga kekompakan koalisi agar pemerintahan Prabowo dapat bekerja secara efektif hingga akhir masa jabatan periode 2024-2029.

"Kalau pun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari nonpartisan," kata Idrus kepada wartawan, Jumat (13/11).

Ia menjelaskan, apabila posisi tersebut diberikan kepada kader partai politik di luar Gerindra, peluang munculnya persaingan kepentingan di antara partai koalisi cukup terbuka. Sebab, masing-masing partai dinilai memiliki aspirasi dan kepentingan untuk ikut menentukan sosok yang akan mendampingi Prabowo.

Bahkan, lanjut Idrus, apabila kader Golkar yang dipilih menjadi wakil presiden sekalipun, hal itu belum tentu dapat diterima sepenuhnya oleh partai-partai lain. Situasi serupa juga berpotensi terjadi jika figur dari partai politik lain yang mendapatkan posisi tersebut.

"Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan," ucap Idrus.

Ia menyebut sejumlah partai politik, seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, dan PKB juga memiliki kepentingan dalam dinamika politik pengisian jabatan wakil presiden. Karena itu, memilih figur dari internal Gerindra bisa menjadi jalan untuk mengurangi potensi persaingan antarkekuatan politik pendukung pemerintah.

"Ini hanya diperlukan suatu soliditas, solidaritas, dan keharmonisan kerja serta efektivitas. Mengurangi gesekan-gesekan partai yang ada," jelasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PKB Bantah Usulkan Cak Imin Gantikan Gibran

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.37 WIB

BANDA ACEH - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II Muhammad Khozin mengklarifikasi informasi yang beredar tentang usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ia menegaskan sesuai ketentuan undang-undang dasar 1945 dan UU MD3, pengusulan calon wapres adalah hak mutlak presiden.

"Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal Hak Angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan," bantah Khozin di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurut anggota DPR Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini, sejak awal PKB menempatkan Putusan MK dan Putusan MA sebagai dasar langkah Politik di Parlemen, sekaligus upaya mengakhiri polemik ijazah sesegera mungkin.

"Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo," tegas Khozin.

Ia berharap lembaga terkait seperti Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pengunduran diri Gibran dengan merujuk UUD 1945 dan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR, dan DPD.

"Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari Wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Profil Brigjen Tedjo Kusumo, Eks Dir Intelijen Densus 88 yang Dikaitkan dengan Sosok TK

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.39 WIB



BANDA ACEH - Nama Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Tedjo Kusumo mencuat di tengah pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perwira tinggi yang lama berkarier di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri itu disebut-sebut sebagai sosok berinisial TK yang kini menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri.Nama Tedjo dihubungkan dengan perkara tersebut berdasarkan informasi yang dihimpun sejumlah media. Namun, Mabes Polri sejauh ini baru mengonfirmasi bahwa TK merupakan perwira tinggi aktif berpangkat brigadir jenderal, tanpa mengumumkan nama lengkapnya.

Di balik itu, Tedjo ternyata memiliki hubungan almamater dengan salah satu tersangka kasus penyadapan Prabowo, yakni Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Keduanya merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999, Batalyon Endra Dharmalaksana. Nama Tedjo dan Eko bahkan tercantum dalam daftar perwira tinggi alumni angkatan tersebut yang telah menyandang pangkat jenderal bintang satu pada 2025.

Eko diketahui menjadi salah satu tersangka kasus penyadapan ilegal yang diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dalam konstruksi perkara, Eko diduga pernah menerima perintah penyadapan ketika menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring dan Analisis (Kabagmon).

Sementara itu, nama TK muncul setelah Kapolri membeberkan dugaan peran tersangka Irjen Ahrie Sonta dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menyebut Ahrie tidak hanya diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," kata Suyudi.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kemudian memastikan TK merupakan perwira tinggi bintang satu yang sedang diperiksa Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri.

"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujar Johnny dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Jejak Satgassus Merah Putih dan Densus 88

Tedjo bukan sosok baru dalam penugasan penyelidikan dan intelijen kepolisian.

Sebelum menduduki sejumlah posisi strategis di Densus 88, ia pernah bertugas di Korps Brigade Mobile (Brimob).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sulitnya Percaya Listyo Sigit Jadi End User Penyadapan Prabowo: Faktor Kedekatan Jokowi Jadi Sorotan

Oleh Redaksi · 13 Nov, 17.14 WIB

BANDA ACEH - Kedekatan historis Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi penyebab utama sulitnya publik memercayai bahwa Listyo sebagai end user atau penerima hasil akhir dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia, Agung Baskoro menanggapi keraguan masyarakat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan peran para tersangka kasus akses ilegal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11).

Agung menilai bahwa situasi ini tidak bisa dilepaskan dari cara kerja opini publik yang terbangun dari rekam jejak hubungan personal masa lalu.

Mengingat Listyo Sigit merupakan figur yang memegang masa jabatan terlama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dimulai saat ini.

"Top of mind mereka itu kan Pak Listyo ini paling lama menjabat di masa Pak Jokowi ya. Nah, sisanya di masa Pak Prabowo, seperti itu. Jadi wajar kalau persepsi mereka mengatakan sebaliknya," ujarnya, Jumat (13/11).

Kedekatan antara Listyo Sigit dan Jokowi sudah terbangun sejak 2011. Semasa Listyo masih menjabat sebagai Kapolresta Surakarta, sementara Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Kedekatan historis inilah yang membuat publik sulit melepaskan asumsi tersebut dari pusaran kasus dugaan penyadapan yang tengah diusut.

"Jadi relasinya jauh sebelum (Jokowi) menjadi Presiden sudah dekat, apalagi ketika menjadi Presiden pasti sangat dekat," terangnya.

Agung menegaskan, opini masyarakat tidak bisa dipaksa untuk langsung berubah dalam waktu singkat.

Satu-satunya cara paling efektif bagi institusi Polri adalah membuktikan profesionalitas melalui kerja nyata yang transparan.

"Polri profesional saja. Cara mengubah persepsi itu apa? Ya kinerja yang oke, pembuktian yang transparan, penyidikan yang akuntabel, ya. Sehingga apa? Persepsi itu bisa terbit perlahan. Karena kan persepsi itu nggak bisa dipaksa," tegasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Disinyalir Siapkan Tandyo Gantikan Agus sebagai Panglima TNI

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.59 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto disinyalir tengah menyiapkan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita untuk menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Nama Tandyo mencuat setelah dirinya digeser dari Wakil Panglima TNI menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, menilai Tandyo berpeluang menjadi prioritas Prabowo untuk dipromosikan menduduki posisi tertinggi di lingkungan TNI tersebut.

"Tampaknya Tandyo menjadi salah satu prioritas yang nantinya akan dipromosikan sebagai Panglima TNI menggantikan Agus Subiyanto," tutur Zaki.

Menurut Zaki, pergantian Panglima TNI sebenarnya bukan kebutuhan yang terlalu mendesak. Namun, pergeseran jabatan Tandyo menjadi KSAD patut dicermati sebagai bagian dari kemungkinan penataan komposisi pimpinan TNI oleh Prabowo.

Perubahan posisi Tandyo tersebut terjadi pada 15 Oktober 2026. Saat itu, Prabowo melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI dan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD.

Langkah tersebut membuat Tandyo memiliki pengalaman sebagai kepala staf angkatan, salah satu persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi Panglima TNI. Sebelumnya, Tandyo menjabat Wakil Panglima TNI setelah posisi tersebut kembali diisi.

Sinyal kemungkinan Tandyo masuk dalam bursa pengganti Agus juga disinggung anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Dia menilai perubahan komposisi pimpinan TNI AD membuat terdapat dua jenderal yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Panglima TNI, yakni Tandyo dan Maruli Simanjuntak.

"Jadi, yang wakil panglima (Tandyo) tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf, sekarang dari AD dua dong. Satu wakil panglima yang baru, kedua KSAD yang baru," ujar Hasanuddin.

Ketika ditanya apakah pengangkatan Tandyo sebagai KSAD merupakan sinyal Prabowo akan mengganti Agus Subiyanto, politikus PDIP tersebut tidak memberikan kepastian.

"Bisa sinyal, bisa tidak," katanya.

Di tengah munculnya nama Tandyo, Komisi I DPR juga belum memberikan kepastian mengenai perkembangan rencana pergantian Panglima TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, sebelumnya meminta publik menunggu proses pembahasan di parlemen.

"Tunggu saja prosesnya daripada menerka-nerka siapa saja nama dalam Surpres tentang Panglima TNI," kata Dave sebagaimana dikutip Katadata, Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani pada 10 November 2026 memastikan parlemen belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI. Pernyataan tersebut disampaikan saat DPR baru memasuki masa persidangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

MPR Tetapkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Baru pada 2 Desember 2026

Oleh Redaksi · 13 Nov, 17.18 WIB

BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, sidang paripurna akan digelar di Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, MPR akan melaksanakan sejumlah tahapan, mulai dari pemilihan hingga pelantikan dan pengesahan calon wakil presiden yang terpilih.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani dalam konferensi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Roy Suryo Tumpengan Rayakan Mundurnya Gibran: Jangan Lupa Diadili Bareng Jokowi

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.22 WIB



BANDA ACEH - Pakar Telematika Roy Suryo menghadiri acara tumpengan syukuran atas pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/11/2026).Dalam kegiatan tersebut, ia menyatakan menyerahkan sepenuhnya urusan penentuan sosok pengganti eks wakil presiden itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun Roy mendesak agar politikus muda itu tetap diproses secara hukum bersama dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kita serahkan ke Pak Prabowo untuk calon penggantinya," kata Roy Suryo.

Menurut Roy, fokus tuntutannya selama ini bukan sekadar agar politikus muda itu mundur dari kursi orang nomor dua di pemerintahan, melainkan proses pemakzulan.

Ia berpendapat bahwa langkah pemakzulan tetap perlu ditempuh supaya sang mantan wapres tidak lagi berhak menerima tunjangan maupun fasilitas dari negara sebagai mantan wakil presiden.

Selain menyoroti soal hak fasilitas negara, ia juga meminta agar proses pertanggungjawaban hukum tetap ditegakkan terhadap Gibran dan Jokowi.

"Yang mau diganti ini diadili dulu. Ya, jangan seenaknya, jangan lupa, bukan hanya dia. Bapaknya (Jokowi) juga," ujar Roy.

Aksi tumpengan di depan kompleks parlemen tersebut digelar sebagai bentuk respons sejumlah elemen masyarakat menyusul langkah Politik dari Gibran.

Sebelumnya Politikus Muda Gibran Rakabuming Raka secara resmi meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.

"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.

Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak tstana maupun partai koalisi mengenai siapa dua nama yang akan secara resmi disetorkan presiden untuk dipilih sesuai mekanisme ketatanegaraan.

Elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga tak memberikan banyak tanggapan ketika diminta untuk memberikan bocoran terkait sikap internal koalisi pemerintahan dalam menggodok nama pengganti dari Gibran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tak Cukup Ganti Kapolri, Prabowo Didorong Copot Panglima TNI 'Warisan' Jokowi

Oleh Redaksi · 14 Nov, 13.51 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto didorong tidak berhenti melakukan penyegaran di tubuh Polri dengan menunjuk Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai pengganti Jenderal Listyo Sigit. Perlu dilanjutkan dengan mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dengan darah segar di TNI. Langkah cepat mengakhiri bayang-bayang rezim Joko Widodo (Jokowi) yang sudah berakhir masanya.Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, menilai pergantian Panglima TNI menjadi bagian dari penyegaran pucuk pimpinan aparat negara yang dapat dilakukan Presiden Prabowo. Terlebih, Agus Subiyanto merupakan Panglima TNI yang diangkat oleh Jokowi pada November 2023, sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.

Menurut Efriza, setelah pergantian Kapolri, momentum penyegaran sebaiknya juga menyentuh institusi TNI. Langkah tersebut dapat memperkuat persepsi publik bahwa pemerintahan Prabowo telah membangun kepemimpinan sendiri dan tidak lagi dibayangi pemerintahan sebelumnya.

"Setelah pergantian Kapolri memang akan lebih baik disertai pergantian kepada Panglima TNI dan juga Jaksa Agung," kata Efriza saat dihubungi inilah.com, Jumat (13/11/2026).

Sorotan terhadap posisi Agus muncul setelah Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 untuk menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Pergantian tersebut telah melalui proses persetujuan DPR, termasuk uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III.

Prabowo Disinyalir Siapkan Tandyo Gantikan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI

Dengan perubahan kepemimpinan di Polri tersebut, wacana penyegaran di institusi TNI kembali menjadi perhatian. Agus sendiri menjabat Panglima TNI sejak 22 November 2023 setelah menggantikan Laksamana Yudo Margono.

Efriza berpandangan, keberadaan pejabat yang diangkat pada era Jokowi perlu menjadi bagian dari evaluasi Prabowo dalam membangun soliditas pemerintahan. Menurutnya, pergantian pejabat yang dianggap masih memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sebelumnya berpeluang mendapat dukungan publik.

Dia menilai, Prabowo perlu memastikan institusi militer berada dalam garis kebijakan pemerintahan yang dipimpinnya. Namun, hal itu bukan berarti loyalitas TNI diarahkan kepada kepentingan pribadi presiden, melainkan tetap berpegang pada konstitusi dan kepentingan negara.

"Jika Prabowo ingin bersih-bersih orang-orang yang ditengarai terkait dengan Jokowi, memungkinkan akan didukung oleh publik. Juga akan menyembul dalam persepsi publik bahwa pemerintahan Prabowo tidak lagi direcoki oleh pemerintahan sebelumnya," ujarnya.

Segera Ajukan Calon Panglima TNI ke DPR

Di sisi lain, pergantian Panglima TNI tidak bisa disamakan dengan pergantian menteri. Untuk itu, Prabowo harus mengajukan calon pengganti Agus, selanjutnya diproses di DPR …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Eks Country Editor Yahoo Bongkar Dalang Penyadapan Presiden Prabowo

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.58 WIB

BANDA ACEH - Mantan Country Editor Yahoo Indonesia, Budi Putra, mengungkapkan bahwa sosok yang diduga menjadi mastermind atau otak di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah dapat diketahui melalui penelusuran teknologi informasi.Pernyataan tersebut disampaikan Budi Putra dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Jumat (13/11/2026). Ia menilai, identifikasi pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tidak membutuhkan waktu lama jika ditangani oleh tim teknologi informasi yang memiliki kemampuan memadai.

Dalam perbincangan bersama Darmawan Supriyossa, Budi juga menyoroti perkembangan Politik setelah munculnya pernyataan Kapolri mengenai penelusuran pasal-pasal terkait dugaan makar.

Darmawan awalnya mempertanyakan apakah dinamika politik yang melibatkan Gibran dalam kurun waktu dua setengah jam dapat menggoyang posisi Presiden Prabowo.

Budi menjelaskan, sebelum perkembangan terbaru, wacana yang berkembang sudah mengarah pada dugaan bahwa pengguna atau pihak yang memanfaatkan jaringan tersebut berasal dari satu kelompok atau geng yang sama.

"Hari ini ada pernyataan Kapolri yang menyatakan masih menelusuri pasal-pasal makar. Itu berarti cukup berdampak," kata Budi.

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut aparat kepolisian, tetapi juga berkaitan dengan pertarungan kepentingan politik. Ia mengingatkan, jika proses penanganannya tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan, dampaknya justru dapat merugikan Presiden Prabowo.

"Awalnya sudah bagus. Apakah happy ending atau sad ending. Kalau hasilnya tidak memuaskan, menurut saya akan merugikan Presiden Prabowo," ujarnya.

Dalam podcast tersebut, Darmawan juga mempertanyakan kemungkinan adanya kesepakatan politik yang mempertukarkan kursi wakil presiden dengan penanganan kasus dugaan penyadapan.

Menanggapi pertanyaan itu, Budi menyebut perkembangan yang terjadi menunjukkan perubahan cukup signifikan. Namun, ia meminta agar perkembangan tersebut terus dicermati.

"Perkembangannya sangat menarik. Ada perubahan yang cukup signifikan. Tentu harus kita cermati terus," ungkapnya.

Pembahasan kemudian mengarah pada kemampuan tim teknologi informasi untuk mengungkap pihak yang berada di ujung rantai dugaan penyadapan, termasuk penerima manfaat dan pengguna jaringan.

Darmawan mempertanyakan apakah waktu delapan hari untuk mengetahui siapa penerima manfaat dan pengguna jaringan merupakan waktu yang terlalu lama bagi tim IT.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kandidat Pengganti Gibran akan Diverifikasi 34 Anggota MPR

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.29 WIB

BANDA ACEH -Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan membentuk tim verifikasi berisi 34 anggota untuk memeriksa persyaratan dan kelengkapan dokumen dua calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman mengatakan, pembentukan tim tersebut merupakan salah satu keputusan rapat gabungan (Ragab) MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

Sebagai tindak lanjut, MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden. Presiden diberikan waktu 14 hari untuk menyampaikan kedua nama tersebut.

"Output Ragab adalah kami akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Siapa di Balik Penyadapan Prabowo? PBNU Kini Mulai Ambil Sikap Tegas

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.54 WIB



BANDA ACEH - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia menyesalkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Organisasi tersebut meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangani kasus itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah pelaksanaan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

"Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Gus Kikin.

PBNU menilai persoalan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme hukum. Karena itu, organisasi tersebut menyatakan mendukung proses penanganan perkara dan menyerahkannya kepada Polri.

"Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

PBNU Minta Lembaga Negara Jaga Persatuan

Selain menyoroti dugaan penyadapan, PBNU menyatakan dukungan terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Gus Kikin juga meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kehormatan bangsa. Ia mengajak para pemangku kepentingan mengedepankan kebersamaan dalam mengambil langkah Politik.

"NU meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan NKRI, menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan tetap menjaga keamanan dan persatuan," katanya.

PBNU turut mengimbau seluruh komponen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika politik nasional. Menurut Gus Kikin, persatuan dan kesatuan perlu dipelihara agar pembangunan nasional dapat berjalan.

Dalam pernyataan sikapnya, PBNU juga menyerukan kepada warga Nahdlatul Ulama untuk memperbanyak zikir, munajat, dan doa agar Indonesia mendapat perlindungan Allah SWT dari berbagai marabahaya serta gangguan yang dapat menghambat pembangunan.

Kasus Dugaan Penyadapan Dibahas di DPR

Pernyataan PBNU tersebut disampaikan ketika penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi pembahasan di Komisi III DPR RI.

Dalam rapat kerja pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tak Lagi Jabat Wapres, KPK Didesak Periksa Gibran Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka

Oleh Redaksi · 13 Nov, 14.03 WIB

BANDA ACEH - Berakhirnya jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai harus menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, pada Januari 2022.Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta KPK tidak lagi menunda pemeriksaan terhadap Gibran terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pernah dilaporkan tersebut.

Menurut Jalih, tidak ada alasan bagi lembaga antirasuah untuk ragu menjalankan kewenangannya, sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

“Gibran sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden. Sudah saatnya KPK berani memeriksa Gibran. Jangan sampai penegakan hukum justru terlihat berbeda ketika berhadapan dengan orang yang pernah menduduki jabatan tinggi negara,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua warga negara, tanpa membedakan jabatan, hubungan keluarga, kekuasaan Politik, maupun latar belakang seseorang.

“Semua sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena pernah menjadi pejabat negara atau memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan,” tegasnya.

Jalih menilai, mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perhatian publik terhadap laporan dugaan korupsi tersebut. Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap seseorang bukan berarti langsung menyimpulkan orang tersebut bersalah. Pemeriksaan justru merupakan bagian dari proses hukum untuk menguji laporan, menelusuri bukti, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui proses hukum. Tetapi kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga tidak perlu takut menetapkan siapa pun sebagai tersangka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jimly: UUD 1945 Tak Batasi Pengganti Wapres Harus dari Partai Pengusung

Oleh Redaksi · 14 Nov, 14.41 WIB



BANDA ACEH – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan UUD 1945 tidak mewajibkan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai Politik (parpol) pengusung.Menurut Jimly, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly seusai menjadi narasumber diskusi publik “Sosialisme Islam” di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Jimly menjelaskan, polemik tersebut berakar pada perbedaan ketentuan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Penjelasan UU MD3 menyebutkan calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai politik pengusung.

"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai, artinya diajukan presiden, dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan 'berasal dari' itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujarnya.

Jimly menilai ketentuan dalam penjelasan UU MD3 keliru karena menganalogikan kekosongan jabatan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.

Jimly memaparkan, persyaratan usulan dari partai politik hanya berlaku apabila terjadi kekosongan kedua jabatan tersebut sekaligus sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Dalam kondisi itu, tugas kepresidenan sementara dijalankan oleh triumvirat yang terdiri atas menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan.

Sementara itu, dalam situasi saat ini, presiden masih menjabat dan hanya posisi wakil presiden yang kosong. Karena itu, ketentuan yang menjadi rujukan adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

"Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ," tegasnya.

Jimly menyebut presiden memiliki keleluasaan dalam menentukan calon pengganti wakil presiden karena UUD 1945 tidak membatasi asal partai kandidat. Calon tersebut dapat berasal dari partai koalisi pertama, koalisi kedua, partai di luar koalisi, maupun tokoh nonpartai.

Jimly juga menyoroti dua cacat formil dalam UU MD3 terkait persoalan tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Rektor Universitas Paramadina: Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Oleh Redaksi · 13 Nov, 17.01 WIB

BANDA ACEH - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengkritik praktik pewarisan kekuasaan Politik melalui anggota keluarga yang dinilainya dapat merusak demokrasi.

Didik menilai fenomena politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak dapat dilepaskan dari ambisi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Gibran menjadi bagian dari eksperimen politik dinasti yang dibangun melalui dukungan dan pengaruh kekuasaan Jokowi.

"Dalam pilihan ini Gibran menjadi kelinci percobaan, merupakan eksperimen politik dinasti dan pewarisan politik melalui dukungan politik kekuasaan pasca-kekuasaan tersebut,” ujar Didik pada Jumat, 13 November 2026.

Dia berpandangan, praktik pewarisan kekuasaan semacam itu merupakan persoalan serius bagi demokrasi karena kepentingan keluarga penguasa dapat bercampur dengan kepentingan negara.

Didik bahkan menyebut praktik tersebut sebagai penyakit demokrasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Din Syamsuddin: Mundurnya Gibran Bermata Dua, Harus Diusut Lewat Proses Pidana

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.14 WIB



BANDA ACEH - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus inisiator Forum Guru Besar Indonesia, Din Syamsuddin, angkat bicara terkait mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.Din menilai, pengunduran diri Gibran merupakan keputusan yang layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai positif dan elegan demi menjaga marwah negara konstitusi, sebagaimana tuntutan 150 guru besar.

Namun, di sisi lain, peristiwa tersebut berpotensi menjadi preseden buruk dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena seorang wakil presiden mundur akibat persoalan yang mencederai kehormatan jabatan.

"Walau Seruan 150 Guru Besar yang saya termasuk pemrakarsa sudah terpenuhi, namun karena ada gejala dan gelagat makar terhadap Presiden serta upaya mantan Presiden Jokowi, sang ayah, yang masih bermanuver Politik," ujar Din dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 November 2026.

Atas situasi tersebut, Din menyayangkan sikap DPR RI yang menghentikan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Menurutnya, HMP merupakan salah satu jalur konstitusional dan proses politik yang semestinya tetap berjalan meskipun pihak yang dipersoalkan telah mengundurkan diri dari jabatannya.

"Keterpilihan Wakil Presiden yang secara konstitusional menyimpang berdasarkan keputusan MK dan MA bukan masalah sederhana," tegasnya.

Din menilai persoalan keterpilihan wakil presiden tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek konstitusional, tetapi juga menyangkut etika, moral, hingga dugaan tindak pidana.

"Demi kebenaran dan keadilan serta pencegahan agar kasus serupa tidak terulang pada masa mendatang, maka harus diusut tuntas lewat proses pidana," katanya.

Prabowo Dinilai Masih Memegang Kendali

Lebih lanjut, Din menyoroti dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir yang menurutnya menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih memegang kendali pemerintahan.

Ia mengibaratkan posisi Prabowo seperti seorang panglima pasukan khusus, baik Kopassus maupun Kostrad, yang tetap memiliki kendali kuat terhadap situasi.

Din menduga, mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden tidak terlepas dari restu Prabowo.

Ia juga mengaitkan dinamika tersebut dengan dugaan penyadapan terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya.

"Mundurnya Gibran Rakabuming dari kursi Wakil Presiden yang tidak dapat dilepas dari restunya dan penyadapan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah anak buahnya adalah buah preemptive action (aksi mendahului). Merupakan sikap decisive dan determinan dilakukannya," ungkap Din.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pasukan Gibran Indonesia Serukan Lawan Prabowo

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.53 WIB

BANDA ACEH - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menyisakan ketegangan Politik. Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy, bahkan melontarkan seruan perlawanan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Seruan tersebut disampaikan Fritz di kantor Wakil Presiden, Jakarta, saat melepas Gibran setelah menyatakan mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.

Fritz mengaku kecewa terhadap sikap Prabowo yang dinilainya membiarkan Gibran terus menjadi sasaran serangan sejumlah anggota partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

"Saya sesalkan Prabowo diam saja. Kita lawan Prabowo," ungkap Fritz, Kalis (12/11/2026).

Menurut Fritz, perlakuan terhadap Gibran mencerminkan ketidakadilan politik. Ia menilai Presiden seharusnya memberikan perlindungan politik kepada wakilnya, bukan membiarkan berbagai serangan terhadap Gibran berkembang tanpa pembelaan yang memadai.

Pernyataan Fritz tersebut memperlihatkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak serta-merta mengakhiri persoalan politik di lingkaran pemerintahan Prabowo.

Sebagaimana diketahui, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Kamis (12/11/2026).

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri.

"Saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," demikian isi surat yang dibacakan Ahmad Muzani.

Pengunduran diri itu berlangsung setelah polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran kembali menguat menyusul putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

CNN Indonesia (12/11/2026) melaporkan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan yang menyangkut kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut dibatalkan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran.

Dalam pernyataan di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026), Prabowo mengaku berat hati menerima keputusan tersebut. Ia menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Oleh Redaksi · 14 Nov, 11.25 WIB



BANDA ACEH - Peneliti media dan Politik Buni Yani meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian serius terhadap isu dugaan penyimpanan uang dalam jumlah sangat besar di kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah.Permintaan tersebut disampaikan Buni Yani melalui unggahan media sosial yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo dan Kapolri.

Dalam pernyataannya, Buni Yani menyebut isu mengenai dugaan keberadaan uang dalam jumlah fantastis di sebuah bunker di rumah Jokowi sudah menjadi pembicaraan umum.

"Bapak Presiden @prabowo dan Pak Kapolri @SuyudiArioSeto Yth. Sudah jadi pembicaraan umum bahwa Jokowi disebut-sebut menyimpan uang sangat banyak di bunker rumahnya di Solo, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Semoga info ini jadi perhatian Bapak untuk diselidiki," tulis Buni Yani, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan tersebut kembali mengangkat isu dugaan bunker penyimpanan uang yang selama ini menjadi perbincangan di ruang publik. Besarnya angka yang disebutkan, yakni puluhan hingga ratusan triliun rupiah, membuat tudingan tersebut menjadi perhatian.

Buni Yani secara khusus meminta Prabowo dan Kapolri tidak mengabaikan informasi yang beredar. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya melalui penyelidikan apabila ditemukan informasi awal dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isu mengenai dugaan bunker di kediaman Jokowi sebelumnya juga pernah disuarakan sejumlah tokoh. Politikus senior PDI Perjuangan Beathor Suryadi, misalnya, pernah menyampaikan dugaan serupa. Buni Yani sendiri sebelumnya juga pernah mempertanyakan keberanian aparat untuk mengusut isu tersebut.

Namun, hingga kini belum ada bukti terverifikasi maupun keterangan resmi aparat penegak hukum yang membenarkan keberadaan bunker berisi uang puluhan atau ratusan triliun rupiah di rumah Jokowi.

Bahkan, pada Agustus 2026, Polri dan ANTARA telah mengklarifikasi informasi viral mengenai penemuan bunker berisi Rp6.000 triliun di rumah Jokowi sebagai hoaks. Video yang digunakan dalam narasi tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI), bukan dokumentasi penggeledahan rumah Jokowi.

Karena itu, klaim mengenai keberadaan bunker dan jumlah uang yang disebutkan Buni Yani perlu dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi.

Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, permintaan Buni Yani menempatkan aparat penegak hukum pada tuntutan transparansi. Jika memang terdapat informasi awal yang dapat diuji, penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti.

ACEH

Kapolda Aceh Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN

Oleh Redaksi · 13 Nov, 21.19 WIB

JAKARTA – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel The Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Rakor tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam mencegah dan menangani tindak pidana pertanahan, mulai dari upaya pencegahan hingga penyelesaian perkara secara tuntas dan berkeadilan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh menerima pin emas dari Kementerian ATR/BPN sebagai bentuk apresiasi kepada Tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan atas keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

"Pin emas ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan tim dalam menyelesaikan target operasi yang telah ditetapkan, yakni pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan," ujar Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polda Aceh untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta sinergi dengan instansi terkait.

Dengan demikian, upaya penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pertanahan, dapat semakin optimal serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.[]

NASIONAL

Meninggal Dunia, Ini Pesan Terakhir dari Rizal Fadillah Tersangka Kasus Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 14 Nov, 11.53 WIB



BANDA ACEH - Tersangka Kasus Ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Rizal Fadillah meninggal dunia di Kota Bandung, Jumat (13/11/2026).

Kepergian almarhum menyisakan sejumlah pesan terakhir bagi keluarga yang diungkapkan langsung oleh Sang Istri, Heni Nuraeni.

Heni menjelaskan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami flu, batuk dan sesak napas.

Ia memastikan menurunnya kondisi suaminya bukan dipicu oleh riwayat penyakit jantung pada tahun 2018 yang sudah ditangani dengan pemasangan ring.

"Sebetulnya bapak punya penyakit jantung tahun 2018 dulu, tapi itu mah dulu sudah di-ring dan tidak jadi masalah buat beliau. Ke rumah sakit ini bukan karena itu. Beliau flu, kemudian batuk-batuk, sesak," kata Heni.

Menurut Heni, meskipun dalam kondisi sesak napas, suaminya tetap berusaha tegar dan tidak ingin terlihat lemah di hadapan anak-anaknya yang berkumpul di rumah sakit.

Pada momen tersebut, almarhum menitipkan pesan terakhir agar anak-anaknya menjaga ibu mereka dan selalu mengandalkan Tuhan.

"Ketika saya bilang, 'Akak capek?' Enggak, katanya. 'Jangan sekali-kali bilang capek, sesaknya saya ini bukan karena saya capek'. Ke anak-anak juga bapak bilang, 'Saleh-salehah, titip Mama', karena kami punya Allah," tutur Heni.

Rizal di mata keluarga, dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, penuh kasih sayang serta tidak pernah menyimpan dendam kepada orang lain.

Namun, ia memiliki prinsip yang tegas apabila menyangkut persoalan agama dan kebenaran. Heni turut menceritakan percakapan terakhir mereka mengenai motif di balik segala aktivitas yang dijalani suaminya selama ini.

"Terakhir kemarin saya tanya, 'Akak selama ini ke sana kemarin untuk apa?' Dijawab, 'Bukan (untuk apa-apa), harus disuarakan kebenaran, Heni'. Dia itu tidak ada tinggi hati, tidak ada dendam ke orang. Dia hanya ingin kebenaran ada di tanah air ini," ungkap Heni.

Meneruskan semangat almarhum, ia pun menitipkan pesan kepada generasi muda agar tidak takut bersuara dalam membela kebenaran.

Adapun berdasarkan pantauan di rumah duka, tampak berjejer sejumlah papan bunga ucapan duka cita, salah satunya berasal dari Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Diketahui, Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi di April 2025.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aktivis 98: Tak Layak Ditangisi, Gibran Harus Masuk Penjara

Oleh Redaksi · 14 Nov, 11.33 WIB



BANDA ACEH - Aktivis 98 Jayadi Santoso menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak perlu disambut dengan tangisan ataupun penyesalan. Menurut Jayadi, persoalan yang menyangkut Gibran tidak boleh berhenti pada pengunduran diri dari jabatan Politik, tetapi harus dilanjutkan dengan proses hukum.Jayadi menilai, mundurnya Gibran dari kursi orang nomor dua di Indonesia bukan alasan untuk mengabaikan dugaan persoalan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi perdebatan publik.

“Tak layak ditangisi. Gibran harus masuk penjara apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait dugaan pemaksuan dokumen sekolah,” tegas Jayadi Santoso kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Menurut dia, jabatan Wakil Presiden bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan perlindungan dari pertanggungjawaban hukum. Setiap warga negara, termasuk pejabat tinggi negara, harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Jayadi mengatakan, pengunduran diri dari jabatan publik tidak otomatis menghapus persoalan hukum yang mungkin melekat pada seseorang. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada dinamika politik setelah munculnya keputusan Gibran untuk mundur.

“Jangan sampai orang berpikir, setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden, semua persoalan selesai. Tidak bisa begitu. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, harus diperiksa dan diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Aktivis yang dikenal sebagai bagian dari gerakan Reformasi 1998 itu juga menekankan pentingnya transparansi dalam mengusut polemik dokumen pendidikan Gibran. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai keabsahan dokumen yang menjadi perdebatan tersebut.

Ia menilai, persoalan ini bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi Gibran, melainkan juga berkaitan dengan integritas penyelenggaraan negara. Sebab, jabatan publik menuntut kejujuran, keterbukaan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap persoalan yang dipertanyakan masyarakat.

Jayadi mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menangani perkara yang melibatkan tokoh politik dan keluarga pejabat negara. Ia meminta seluruh dugaan yang muncul diperiksa secara objektif, disertai pembuktian dan prosedur hukum yang berlaku.

“Kalau rakyat kecil berhadapan dengan hukum, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan sampai ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan Wakil Presiden atau berasal dari keluarga penguasa,” kata Jayadi.

Lebih jauh, Jayadi menegaskan bahwa ukuran pertanggungjawaban seorang pejabat bukan terletak pada jabatan yang pernah disandangnya, melainkan pada kepatuhan terhadap hukum.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Lengsernya Gibran Buktikan Jokowi Effect Sudah Tidak Powerfull Lagi

Oleh Redaksi · 13 Nov, 17.11 WIB

BANDA ACEH - Kursi Wakil Presiden RI resmi lowong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) pukul 11.17 WIB.

Peristiwa Politik luar biasa ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa pengaruh politik Joko Widodo atau Jokowi effect saat ini sudah tidak powerful lagi di panggung nasional.

Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia Agung Baskoro menilai, figur Jokowi masih besar, namun tidak lagi sebesar ketika ia masih menjabat sebagai kepala negara. Apalagi, berbagai isu negatif terus menerpanya.

"Pak Jokowi masih besar, tapi tidak sebesar ketika ia menjabat sebagai presiden. Karena kita tahu pengaruh ini pudar karena diuji dengan masalah demi masalah yang tak kunjung selesai ya," ujar Agung Baskoro kepada JawaPos.com, Jumat (13/11).

Deretan isu tersebut mencakup polemik ijazah S1 Jokowi, ijazah SMA Gibran, hingga wacana pemakzulan yang lebih awal didorong oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Belum lagi, dinamika politik ini turut diperparah oleh residu dari kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, historis kedekatan antara Listyo Sigit dan Jokowi membuat publik sulit melepaskan asumsi keterkaitan Jokowi dari pusaran kasus ini.

"Jadi relasinya jauh sebelum (Jokowi) menjadi Presiden sudah dekat, apalagi ketika menjadi Presiden pasti sangat dekat," terangnya.

Peristiwa ini sekaligus menorehkan sejarah baru di Indonesia pasca reformasi. Untuk pertama kalinya, seorang wakil presiden harus turun di tengah jalan karena gagal mengonsolidasikan elite politik di negeri ini.

"Pertama kalinya pasca reformasi ada wapres yang turun di tengah jalan, ia gagal mengkonsolidasikan elit politik di negeri ini," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, pengunduran diri Gibran ini merupakan tindak lanjut setelah sehari sebelumnya, Rabu (11/11) pagi, ia lebih dulu menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan penyerahan dokumen tersebut dan memastikan lembaganya akan segera memproses dokumen itu sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani, Kamis (12/11)

NASIONAL

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Oleh Redaksi · 13 Nov, 17.04 WIB

BANDA ACEH -Puluhan kader dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026.

Kedatangan para kader ini untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi internal partai sekaligus aksi simbolik dengan cara menyegel kantor partai.

Koordinator Kader Penyelamat Ka'bah (KPK), Ahmad Yani mengatakan kedatangan dirinya bersama puluhan Pengurus Nasional F-PPP untuk menuntut keadilan terhadap sejumlah pengurus partai yang diberhentikan sepihak oleh pengurus DPP.

Termasuk pemberhentian sepihak Ketua Umum Mardiono terhadap Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) selaku Sekjen Partai dan Agus Suparmanto selaku Wakil …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Festival Merah Putih 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Ruang Promosi UMKM dan Kreativitas Masyarakat

Oleh Redaksi · 13 Nov, 21.48 WIB

SABANG – Pemerintah Kota Sabang menggelar Festival Merah Putih Tahun 2026 sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat promosi pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian seni budaya, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Festival yang mengusung tema “Semangat Merah Putih, Pesisir Bersih, Ekonomi Tumbuh dan Seni Budaya Lestari” tersebut resmi dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Sabang, Rinaldi Syahputra, di Dermaga CT-1 BPKS, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, jajaran Pemerintah Kota Sabang, Ketua TP-PKK Kota Sabang, serta sejumlah undangan lainnya.

Usai pembukaan, Plt. Sekda bersama para tamu undangan meninjau sejumlah stan bazar UMKM. Ketua TP-PKK Kota Sabang, Nuri Farisal, yang turut dalam kunjungan tersebut juga berbelanja sejumlah produk …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pengamat: DPR dan MPR Jangan Terkecoh Manuver Politik Pengunduran Diri Gibran

Oleh Redaksi · 14 Nov, 10.01 WIB



BANDA ACEH - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diselesaikan berdasarkan mekanisme konstitusi, bukan semata-mata melalui manuver Politik.Menurut Amir, surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada DPR maupun Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses pemakzulan yang selama ini disuarakan masyarakat.

Ia mengingatkan DPR dan MPR agar tidak membalikkan prinsip konstitusi hanya karena adanya dinamika politik di sekitar pengunduran diri Gibran.

“Surat pengunduran diri Gibran itu masalah konstitusi, bukan masalah kekuasaan. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola kekuasaan, MPR jangan membalikkan konstitusi,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai, penyampaian surat pengunduran diri tersebut merupakan sikap dan langkah politik yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara.

Amir berpandangan, persoalan pengunduran diri tidak boleh secara otomatis menghapus tuntutan masyarakat agar DPR menjalankan kewenangannya dalam proses pemberhentian Wakil Presiden.

Menurut dia, DPR harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

“Apapun alasannya, persoalan Gibran harus diproses secara konstitusional. DPR dan MPR harus menjalankan kewenangan mereka sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945,” tegasnya.

Amir juga mengaitkan polemik jabatan Gibran dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi perhatian publik.

Menurut dia, berbagai persoalan hukum terkait persyaratan dan legitimasi jabatan Wakil Presiden harus mendapatkan perhatian serius dari lembaga negara.

Ia menilai DPR tidak boleh mengabaikan tuntutan masyarakat untuk menguji persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Karena itu, menurut Amir, proses pemakzulan yang disuarakan masyarakat harus diakomodasi dan ditindaklanjuti oleh DPR sesuai kewenangannya.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses pemberhentian seorang Wakil Presiden tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan tekanan politik maupun pernyataan pihak tertentu. Harus ada mekanisme hukum dan pembuktian sebagaimana ditentukan konstitusi.

Amir juga mengingatkan agar pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran tidak mendahului penyelesaian persoalan status jabatan Wakil Presiden.

Menurutnya, sebelum ada kepastian hukum mengenai status jabatan tersebut, DPR dan MPR harus berhati-hati dalam mengambil langkah politik maupun kelembagaan.

Ia menegaskan, apabila jalur yang ditempuh adalah pemakzulan, prosesnya harus diselesaikan melalui tahapan yang ditentukan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo: Yang Bisa Bikin Revolusi di Indonesia adalah Saya

Oleh Redaksi · 14 Nov, 19.38 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya mampu menciptakan revolusi di Indonesia. Kepala Negara menjelaskan revolusi diperlukan untuk memperbaiki sistem yang dinilainya masih keliru, sekaligus menyelamatkan kekayaan negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia."Yang bisa bikin revolusi di Indonesia adalah Prabowo Subianto, saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo saat berpidato dalam acara Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-114 di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengklaim memiliki dukungan dari sejumlah organisasi Islam besar, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis). Selain itu, Prabowo menyebut petani dan nelayan berada di belakang perjuangannya.

Menurut Prabowo, tekad melakukan perubahan tersebut dilandasi kegelisahannya melihat kondisi masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan, sementara kekayaan Indonesia terus diambil dan praktik korupsi masih terjadi.

"Di usia saya pensiun saya harus melihat rakyat saya masih miskin, saya harus melihat kekayaan kita diambil terus, saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli. Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli, saudara-saudara sekalian," katanya.

Prabowo mengaku tidak akan gentar menghadapi berbagai tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan langkah pembenahan yang dilakukannya. Dia bahkan menyinggung kemungkinan munculnya demonstrasi hingga kerusuhan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahannya.

"Disangka saya gentar, saya tidak akan gentar, saudara-saudara sekalian," tegasnya.

Dia juga mengingatkan kembali latar belakangnya sebagai prajurit yang sejak awal telah siap menghadapi berbagai risiko perjuangan.

"Mereka lupa saya letnan, enggak punya apa-apa, siap mati. Apalagi sekarang," ucap Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan revolusi yang dimaksud berkaitan dengan upaya memperbaiki sistem pemerintahan dan menyelamatkan kekayaan nasional. Dia menyebut pekerjaan tersebut menjadi bagian dari agenda yang dijalankan bersama para pembantunya di pemerintahan.

"Yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

ACEH

Peserta Olimpiade PAI Aceh Barat Siap Berlaga di Grand Final Nasional

Oleh Biro Meulaboh · 13 Nov, 20.08 WIB

MEULABOH – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPD AGPAII) Kabupaten Aceh Barat melakukan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat serta sejumlah pejabat terkait untuk memperkuat dukungan bagi peserta yang meraih juara nasional dan lolos ke Grand Final Olimpiade Pendidikan Agama Islam (PAI) Nasional 2026.

Audiensi yang berlangsung Jumat (13/11/2026) tersebut turut melibatkan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah kepala sekolah terkait.

Grand Final Olimpiade PAI Nasional dijadwalkan berlangsung pada 22–24 November 2026 di Provinsi Lampung.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P M.M, menyampaikan apresiasi atas capaian para peserta yang berhasil mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap generasi muda yang berprestasi, termasuk dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung anak-anak Aceh Barat yang telah meraih prestasi nasional dan lolos ke Grand Final Olimpiade PAI 2026 di Lampung. Ini menjadi kebanggaan daerah sekaligus motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar dan berprestasi," ujar Tarmizi.

Ia berharap seluruh peserta mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, menjunjung tinggi sportivitas, dan memberikan penampilan terbaik demi membawa nama baik Aceh Barat.

Sementara itu, Ketua DPD AGPAII Aceh Barat, Syahwaluddin, MA, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian para peserta. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil pembinaan dan kerja sama antara peserta didik, guru, sekolah, orang tua, serta dukungan berbagai pihak.

"Kami sangat bersyukur atas capaian anak-anak Aceh Barat. Dukungan pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait menjadi motivasi besar bagi peserta untuk tampil maksimal di Grand Final Nasional. Harapan kami, mereka mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama Aceh Barat di tingkat nasional," ungkap Syahwaluddin.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh kepala sekolah atas perhatian dan dukungan yang diberikan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Quick Wins Kapolri, Wakapolda Aceh Tanam Pohon di Dayah Abu Sibreh

Oleh Redaksi · 13 Nov, 19.30 WIB

BANDA ACEH — Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Latif Usman bersama sejumlah pejabat utama Polda Aceh menanam pohon di lingkungan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (13/11/2026).

Penanaman pohon yang merupakan bagian dari program Green Policing Quick Wins Kapolri tersebut turut diikuti Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Tgk. Faisal Ali, Kapolres Aceh Besar, dan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda Aceh juga menyerahkan bantuan sembako, meninjau sejumlah bangunan di kompleks dayah, serta berinteraksi langsung dengan para santri.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, Green Policing merupakan bagian dari program Quick Wins Kapolri sekaligus wujud komitmen Polri, khususnya Polda Aceh, dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

“Hari ini, Wakapolda Aceh bersama pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah dan masyarakat melaksanakan penanaman pohon sebagai bagian dari program prioritas Kapolri. Kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang,” ujar Joko yang turut mendampingi Wakapolda Aceh dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap program Green Policing dapat menggerakkan lebih banyak masyarakat untuk menanam dan merawat pohon sehingga tercipta lingkungan yang hijau, sehat, dan lestari bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Sementara itu, Tgk. Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Sibreh mengapresiasi dan mendukung program Green Policing Polda Aceh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sudah Ditentukan Prabowo, Minggu Ini Akan Terungkap Siapa Pengganti Gibran

Oleh Redaksi · 14 Nov, 12.12 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa presiden memberikan tenggat waktu selama satu pekan kepada partai-partai Politik pengusung untuk mendiskusikan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.Zulkifli menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Arahan tersebut disampaikan sang presiden dalam pertemuan tertutup bersama para ketua umum dan petinggi partai koalisi pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat.

"Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah Bapak Presiden," ujar Zulkifli Hasan dikutip Sabtu (14/11/2026).

Menurut Zulkifli, Presiden Prabowo belum mengumumkan maupun menetapkan nama kandidat pada pertemuan malam itu karena kepala negara memiliki agenda kunjungan kerja ke dalam dan luar negeri.

Prabowo diketahui dijadwalkan menghadiri kegiatan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya ia akan melanjutkan perjalanan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Pembahasan lanjutan mengenai figur pengganti wapres baru akan digelar kembali setelah sang presiden merampungkan rangkaian agenda kenegaraan tersebut.

"Nah, pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada beliau di Minggu depan ya," tutur Zulkifli.

Pertemuan di Istana Bogor tersebut dihadiri sejumlah pimpinan partai koalisi, di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad hingga Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza.

Sebelumnya Politikus Muda Gibran Rakabuming Raka secara resmi meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Luhut Temui PBNU: Pokoknya Kita Harus Satu, Jangan Merembet Lagi

Oleh Redaksi · 14 Nov, 16.13 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menerima kunjungan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Setelah pertemuan di lantai 3, keduanya melanjutkan kunjungan ke Pojok Gus Dur di lobi gedung PBNU.Gus Kikin menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas kondisi Indonesia saat ini dan tantangan bangsa ke depan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan kebersamaan seluruh elemen bangsa.

“Kita ini sama-sama berpikir bagaimana kondisi Indonesia hingga saat ini dan nanti ke depan lagi kita tetap sama-sama kita jaga. Semua komponen bangsa ini memang harus kompak, guyub, jadi Indonesia,” jelasnya.

Ia berharap Indonesia tetap dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang ramah dan menjunjung tinggi persaudaraan.

“Salah satu bangsa yang sangat ramah terhadap orang, maka itu kita jaga tradisi itu,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Kikin juga memperkenalkan buku Qanun Asasi NU kepada Luhut. Ia menjelaskan bahwa buku tersebut memuat nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, kebersamaan, ukhuwah, dan persaudaraan yang menjadi pedoman NU dalam menjalankan peran kebangsaan.

“Itu sekarang dan yang akan datang NU kita menggunakan ini sebagai panduan jalan NU ke depan untuk menjaga bangsa ini,” katanya.

Sementara itu, Luhut mengungkapkan bahwa buku yang diberikan Gus Kikin memuat sejumlah pesan tentang persatuan, kesatuan, kebersamaan, keadilan, serta larangan memelihara kebencian.

“Tadi beliau sudah sampaikan. Saya pikir dalam kondisi sekarang dunia yang tak jelas ini sekarang ya kita jangan sampai merembet-rembet lagi. Pokoknya harus satu,” jelasnya.

Terkait kondisi perekonomian Indonesia, Luhut menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi. Namun, ia berharap berbagai program pemerintah yang sedang berjalan dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

“Ekonomi saya kira juga cukup bagus ya masih sana-sini ada kurang tapi kita percaya dengan program-program sekarang, saya kira mulai disisir itu kita akan bisa baik,” terangnya.

ACEH

Dari Pemerintahan hingga Dunia Usaha, 15 Tokoh Terima SMSI Aceh Besar Awards 2026

Oleh Redaksi · 13 Nov, 17.52 WIB

ACEH BESAR – Sebuah penghargaan tidak selalu berbicara tentang piala, piagam, atau seremoni. Lebih dari itu, penghargaan merupakan bentuk pengakuan terhadap kerja, dedikasi, dan pengabdian seseorang maupun lembaga yang telah memberikan arti bagi masyarakat.

Semangat itulah yang melatarbelakangi penyelenggaraan SMSI Aceh Besar Awards 2026. Sebanyak 15 tokoh dan lembaga dari berbagai unsur akan menerima penghargaan atas kontribusi serta peran mereka dalam mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, keamanan, dunia usaha, dan kemajuan masyarakat.

Agenda apresiasi tersebut akan berlangsung di Hotel The Pade, Aceh Besar, Sabtu, 14 November 2026, sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar masa bakti 2026–2029.

Bagi SMSI Aceh Besar, kegiatan ini bukan sekadar agenda organisasi. Ada pesan yang ingin disampaikan, bahwa kemajuan sebuah daerah tidak pernah lahir dari kerja satu pihak saja. Di dalamnya terdapat peran pemerintah, legislatif, aparat keamanan, penegak hukum, pelaku usaha, serta berbagai elemen masyarakat yang saling melengkapi.

Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, didampingi Sekretaris Sadhali, Jumat (13/11/2026), menyampaikan bahwa SMSI Aceh Besar Awards merupakan wujud penghormatan organisasi terhadap pihak-pihak yang selama ini menunjukkan kepedulian dan kontribusi nyata bagi daerah.

Menurut Zulfikar, penghargaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap bentuk pengabdian dan kerja positif patut mendapatkan apresiasi.

“Melalui SMSI Aceh Besar Awards 2026, kami ingin memberikan penghargaan kepada tokoh, lembaga, dan mitra strategis yang telah berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan Aceh Besar. Kami berharap apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan kemitraan yang positif,” ujarnya.

Tahun ini, SMSI Aceh Besar mengusung tema “Merawat Kemitraan, Mengapresiasi Kontribusi, Mendorong Kemajuan Aceh Besar.”

Tema tersebut menjadi gambaran arah organisasi dalam membangun hubungan kemitraan yang harmonis, profesional, dan berkelanjutan. Sebab, pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut mengawal pembangunan melalui pemberitaan yang independen, berimbang, dan bertanggung jawab.

Sekretaris SMSI Aceh Besar, Sadhali, menjelaskan bahwa 15 penerima penghargaan telah ditetapkan berdasarkan kategori dan bidang kontribusi masing-masing.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PKB Berharap Cak Imin Dipinang Prabowo jadi Cawapres Pengganti Gibran

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.54 WIB

BANDA ACEH - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dipinang Presiden Prabowo sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani, menyikapi dinamika Politik terkait kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) RI.

Lalu mengatakan, partainya memiliki harapan agar Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bisa menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

"Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan?" kata Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Meski demikian, Lalu menegaskan bahwa proses penentuan pengganti wakil presiden masih berjalan. Karena itu, PKB memilih menunggu perkembangan dan menghormati mekanisme yang berlaku, termasuk kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan nama calon pengganti.

"Nah, tapi ya kembali lagi, kembali lagi bahwa ini masih berproses, kemudian apa namanya, tentu sesuai dengan regulasi diberikan kesempatan kepada Bapak Presiden selama maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirim dua calon wakil presiden beliau, ya kita tunggu saja, ya," ujarnya.

Dia juga memastikan, seluruh kader PKB akan mengikuti keputusan yang diambil Ketua Umum. Menurutnya, sikap partai tetap solid dan tidak akan mendahului keputusan pimpinan dalam menentukan langkah politik selanjutnya.

"PKB prinsipnya sami’na wa thana terhadap Ketua Umum.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Skenario Geng Solo: Gibran Berpotensi Dijadikan Martir Politik Menuju Pilpres 2029

Oleh Redaksi · 14 Nov, 09.58 WIB



BANDA ACEH - Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menjadi bagian dari strategi Politik jangka panjang kelompok yang selama ini dikenal sebagai Geng Solo. Pengunduran diri tersebut dikhawatirkan tidak hanya dipandang sebagai keputusan politik, tetapi juga dikemas menjadi narasi pengorbanan seorang pemimpin muda yang diklaim demi kepentingan bangsa dan negara.Analisis tersebut disampaikan mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf. (Purn.) Sri Radjasa Chandra, dalam sebuah siniar jurnalistik bersama pembawa acara May Dilla Hantika.

Sri Radjasa mengendus adanya kemungkinan skenario glorifikasi politik terhadap Gibran. Menurutnya, langkah pengunduran diri dapat dimanfaatkan untuk membangun citra bahwa Gibran merupakan korban tekanan dan ketidakadilan politik dari kekuatan elite di parlemen.

Ia mengingatkan publik agar tidak serta-merta menerima narasi pengunduran diri sebagai bentuk sikap kenegarawanan.

Menurut analisis Sri Radjasa, ada potensi pembalikan opini yang membuat Gibran justru tampil sebagai martir politik.

“Jangan sampai pengunduran diri ini justru menjadi panggung untuk membangun citra bahwa Gibran adalah korban politik yang berkorban demi bangsa dan negara,” demikian inti peringatan Sri Radjasa dalam analisisnya, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai, apabila skenario tersebut berhasil dimainkan, kelompok politik yang berada di belakang Gibran justru bisa memperoleh keuntungan besar.

Sri Radjasa menjelaskan, salah satu kemungkinan strategi yang perlu dicermati adalah membangun persepsi bahwa keluarga Solo sedang menghadapi tekanan dan perlakuan tidak adil dari sejumlah kekuatan politik.

Narasi dizalimi tersebut berpotensi membangkitkan solidaritas para pendukung Joko Widodo dan Gibran. Bahkan, situasi itu dapat dimanfaatkan untuk menggalang kembali dukungan masyarakat akar rumput.

Dalam kalkulasi politik, sosok yang dipersepsikan sebagai korban ketidakadilan sering kali justru memperoleh simpati publik. Kondisi tersebut dapat menjadi modal politik baru bagi Gibran, meskipun tidak lagi menduduki jabatan Wakil Presiden.

Sri Radjasa melihat kemungkinan tersebut sebagai manuver yang harus diwaspadai. Sebab, pengunduran diri tidak otomatis mengakhiri pengaruh politik seseorang maupun jaringan kekuatan yang berada di belakangnya.

Lebih jauh, Sri Radjasa mengingatkan bahwa pembentukan citra sebagai korban politik bisa menjadi investasi jangka panjang bagi perjalanan politik Gibran.

Dengan tetap terpeliharanya loyalitas pendukung Jokowi, Gibran berpeluang mempertahankan daya tawar di hadapan partai-partai politik. Jaringan pendukung dan kekuatan politik yang masih bertahan dapat menjadi modal untuk kembali masuk dalam pertarungan kekuasaan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ferry Irwandi Sentil Masyarakat yang Menangisi Gibran Kehilangan Jabatan Wapres, Dia Masih Bisa Hidup Nyaman

Oleh Redaksi · 14 Nov, 10.13 WIB



BANDA ACEH -Pegiat media sosial Ferry Irwandi menyentil fenomena masyarakat yang menunjukkan kesedihan ketika seorang pejabat kehilangan jabatan, seperti yang terjadi dalam polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ferry mengajak masyarakat untuk lebih kritis melihat persoalan tersebut. Menurut dia, pejabat yang tidak lagi menduduki jabatan tetap memiliki peluang menjalani kehidupan nyaman, termasuk dengan berbagai hak dan fasilitas yang melekat setelah masa jabatannya berakhir.

Sebaliknya, masyarakat yang justru larut dalam kesedihan atas hilangnya jabatan seorang pejabat masih harus menghadapi persoalan hidup sehari-hari, mulai dari ketidakpastian masa depan hingga beban ekonomi keluarga.

Dalam komentarnya, Ferry menggambarkan kontras antara kehidupan pejabat yang kehilangan jabatan dan kondisi masyarakat yang masih harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Polikus yang kau tangisi itu tetap bisa hidup nyaman meski tak lagi memiliki jabatan. Mendapatkan fasilitas dari negara meski tidak seumur hidup bekerja,” kata Ferry Irwandi, Jumat (13/11/2026).

“Sementara kau yang menangisi, esok juga harus bekerja keras lagi, masa depan tetap belum pasti, cicilan dan biaya pendidikan anak masih harus kau usahakan sendiri. Selayaknya, dirimulah yang seharusnya kau tangisi,” sambungnya.

Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap sikap sebagian masyarakat yang dinilai terlalu mencurahkan emosi untuk membela atau meratapi nasib pejabat, sementara persoalan kesejahteraan mereka sendiri belum tentu mendapatkan perhatian yang sama.

Pesan Ferry mengingatkan bahwa kehilangan jabatan tidak serta-merta membuat seorang pejabat kehilangan kemampuan untuk hidup layak. Sementara bagi masyarakat kebanyakan, kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan justru dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup keluarga.

Melalui kritik tersebut, Ferry seolah mengajak masyarakat mengalihkan perhatian dari drama perebutan maupun kehilangan kekuasaan kepada persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka: pekerjaan, biaya pendidikan anak, cicilan, dan kepastian masa depan.

Sekadar diketahui sobat Holopis, bahwa Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Kamis, 12 November 2026.

Pengunduran Gibran resmi efektif setelah putra sulung Joko Widodo (Jokowi) tersebut menyerahkan surat pengunduran resmi ke Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di gedung Parlemen Senayan Jakarta Pusat di hari yang sama.

Kemudian pada malam harinya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan konferensi pers tentang pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya dalam pemerintahan periode 2024-2029 itu

EKONOMI

APBK 2027 Aceh Barat Capai Rp1,28 Triliun, Ini Prioritasnya

Oleh Biro Meulaboh · 13 Nov, 15.32 WIB

MEULABOH– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memproyeksikan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2027 mencapai Rp1,28 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, saat menghadiri pembukaan Rapat Paripurna VII Masa Sidang III DPRK Aceh Barat dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan APBK 2027, bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH, di ruang sidang utama DPRK, Jumat (13/11/26).

Tarmizi mengatakan, Pemkab Aceh Barat telah merampungkan input rincian APBK 2027 berdasarkan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati sebelumnya.

Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia mengakui, kemampuan keuangan daerah masih terbatas karena pendapatan Aceh Barat sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah dituntut lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Setiap belanja pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Tarmizi.

Menurutnya, pembangunan Aceh Barat pada 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Seluruh program tersebut, lanjutnya, harus disusun secara terukur dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Adapun rancangan komposisi APBK Aceh Barat 2027 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp1.250.013.392.044, belanja daerah Rp1.289.886.422.836, serta pembiayaan daerah Rp39.873.030.792.

Tarmizi berharap DPRK dapat memberikan masukan dan saran konstruktif untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih realistis dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah menyusun program dan kegiatan secara cermat, dengan target yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

KOMUNITAS

PBNU Percayakan Penyelesaian Masalah kepada Prabowo, Gus Ipul: Kita Percaya Sepenuhnya

Oleh Van · 13 Nov, 15.25 WIB

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kepercayaan organisasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang.

Gus Ipul meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan maupun menyampaikan pernyataan yang berpotensi memperkeruh keadaan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap sejuk dan kondusif.

“Ya, mari kita jaga bersama-sama. PBNU mengajak kita semua untuk bisa menciptakan suasana yang adem di tengah-tengah masyarakat,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.

Gus Ipul Minta Semua Pihak Ikuti Mekanisme

Menurut Gus Ipul, setiap persoalan perlu diselesaikan dengan menghormati mekanisme yang berlaku. Pihak-pihak terkait juga perlu diberi kesempatan untuk mencari jalan keluar terbaik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mardani PKS Sarankan Presiden Cari Wapres yang Jago Ekonomi, Singgung Sosok Boediono

Oleh Redaksi · 14 Nov, 10.08 WIB



BANDA ACEH - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PKSMardani Ali Sera menyarankan Presiden Prabowo Subianto memilih calon wakil presiden (wapres) yang memiliki kapasitas memperkuat perekonomian Indonesia. Menurutnya, kemampuan ekonomi menjadi salah satu faktor penting untuk menghadapi tantangan global dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Saran tersebut disampaikan Mardani menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wapres. Dia berharap sosok pengganti Gibran nantinya dapat bekerja sama dengan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

"Kita berharap wapres yang terpilih nanti bisa bekerja sama dengan Presiden dalam memimpin bangsa," kata Mardani dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (14/11/2026).

Mardani menilai, Indonesia membutuhkan figur wapres yang memiliki kemampuan menjaga stabilitas sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Terlebih, dinamika global saat ini turut memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

"Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri," ucap Mardani.

Dia kemudian mencontohkan kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggandeng Boediono sebagai wapres pada periode kedua pemerintahannya. Boediono dikenal sebagai profesor sekaligus ekonom yang dinilai memiliki kapasitas di bidang perekonomian.

Mardani menyinggung capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era SBY-Boediono yang sempat menembus angka di atas 6 persen.

"Di periode kedua Pak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,22%. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi mencapai angka 6,49%. Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar," kata Mardani.

Menurutnya, tantangan pemerintahan ke depan membutuhkan kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik yang baik. Karena itu, sektor ekonomi harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pendamping presiden.

"Ke depan kondisi tidak mudah, perlu pelayanan dan kualitas terbaik dari pemerintahan. Dan untuk itu, ekonomi Indonesia harus terjaga demi menjamin kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Diketahui, polemik pengisian jabatan wapres muncul setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri tersebut menyusul polemik surat keterangan (suket) ijazah SMA miliknya yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).

Sehari kemudian, Jumat (13/11/2026), Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai Politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Oleh Redaksi · 14 Nov, 08.34 WIB



BANDA ACEH -Persoalan pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres harus diselesaikan berdasarkan mekanisme konstitusi, bukan semata-mata melalui manuver Politik.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada MPR maupun Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses pemakzulan yang selama ini disuarakan masyarakat.

Ia mengingatkan DPR dan MPR agar tidak membalikkan prinsip konstitusi hanya karena adanya dinamika politik di sekitar pengunduran diri Gibran.

"Surat pengunduran diri Gibran itu masalah konstitusi, bukan masalah kekuasaan. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola kekuasaan, MPR jangan membalikkan konstitusi," kata Amir, dikutip Sabtu 14 November 2026.

Amir menilai, penyampaian surat pengunduran diri tersebut merupakan sikap dan langkah politik yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara.

Amir berpandangan, persoalan pengunduran diri tidak boleh secara otomatis menghapus tuntutan masyarakat agar DPR menjalankan kewenangannya dalam proses pemberhentian Wapres.

Amir mendorong DPR harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

"Apapun alasannya, persoalan Gibran harus diproses secara konstitusional. DPR dan MPR harus menjalankan kewenangan mereka sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945," kata Amir.

Amir juga mengaitkan polemik jabatan Gibran dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi perhatian publik.

Berbagai persoalan hukum terkait persyaratan dan legitimasi jabatan Wapres, kata Amir, harus mendapatkan perhatian serius dari lembaga negara.

Ia menilai DPR tidak boleh mengabaikan tuntutan masyarakat untuk menguji persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Karena itu, menurut Amir, proses pemakzulan yang disuarakan masyarakat harus diakomodasi dan ditindaklanjuti oleh DPR sesuai kewenangannya.

Amir juga mengingatkan agar pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran tidak mendahului penyelesaian persoalan status jabatan Wakil Presiden.

Menurutnya, sebelum ada kepastian hukum mengenai status jabatan tersebut, DPR dan MPR harus berhati-hati dalam mengambil langkah politik maupun kelembagaan.

Ia menegaskan, apabila jalur yang ditempuh adalah pemakzulan, prosesnya harus diselesaikan melalui tahapan yang ditentukan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

"Selama belum ada keputusan MPR mengenai pemakzulan Gibran sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B, jangan mendahului dengan proses penggantian Wapres. Konstitusi harus dijalankan secara utuh," pungkas Amir.

EKONOMI

79 Persen Buruh Terancam Sulit Memiliki Rumah

Oleh Syarifudin Brutu · 13 Nov, 15.04 WIB

Persoalan kepemilikan rumah masih menjadi beban serius bagi pekerja dan buruh di kawasan industri. Hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkirakan sekitar 79 persen pekerja berpotensi tidak mampu membeli rumah apabila skema pembiayaan dan jangka waktu kredit perumahan tidak mengalami perubahan.

Temuan tersebut mengungkap persoalan mendasar dalam akses masyarakat pekerja terhadap hunian layak. Tingginya harga tanah dan rumah, perbedaan tingkat upah antardaerah, serta lokasi tempat tinggal yang jauh dari kawasan industri menjadi sejumlah faktor yang mempersempit kemampuan buruh untuk memiliki rumah sendiri.

Hasil penelitian itu diperoleh melalui survei yang dilaksanakan pada 6–28 September 2026 terhadap 1.028 pekerja di lima kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Jawa. Wilayah penelitian meliputi Pulogadung/JIEP, Jababeka dan MM2100, Industropolis Batang, Tanjung Lesung, serta Gresik.

Kepala Pusat Riset Hukum BRIN, Nawawi, menilai persoalan perumahan pekerja tidak cukup diselesaikan dengan membangun unit rumah sebanyak-banyaknya. Menurutnya, akses terhadap hunian berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pernyataan tersebut disampaikan Nawawi dalam kegiatan Diseminasi Hasil Kajian atas Kebutuhan Perumahan Pekerja/Buruh di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang diselenggarakan secara hybrid pada Rabu, 11 November 2026.

Dalam pemaparan hasil penelitian, Nawawi mengungkapkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki hunian mandiri. Dari keseluruhan peserta survei, 76,91 persen merupakan laki-laki dan 76,60 persen berpendidikan SMA/SMK. Sementara itu, sebanyak 59,09 persen responden merupakan pendatang.

Kondisi tersebut semakin terlihat dari tingginya jumlah pekerja yang masih tinggal bersama keluarga. BRIN mencatat 45,54 persen responden menempati rumah orang tua atau mertua dalam satu rumah tangga. Fenomena ini disebut sebagai backlog perumahan tersembunyi.

Di Kabupaten Batang, persentase pekerja yang mengalami kondisi tersebut bahkan mencapai 76,12 persen. Selain itu, kepemilikan rumah juga belum sepenuhnya terjangkau bagi pekerja tetap maupun kontrak.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Dobrak Keterbatasan Layanan, ATM BBPOM Aceh Jadi Role Model KemenHAM RI di MPP

Oleh Redaksi · 13 Nov, 15.01 WIB

BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) berbagi pengalaman dan praktik baik inovasi pelayanan publik kepada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) melalui kegiatan Sharing Inovasi Layanan Publik yang dilaksanakan secara daring, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KemenHAM RI melakukan benchmarking terhadap instansi pemerintah yang telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kegiatan dipandu oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widi Krisnowahadi, dan diikuti oleh 11 peserta dari KemenHAM RI dan BBPOM Aceh.

Pertemuan ini bertujuan memperoleh informasi, pengalaman, serta praktik baik mengenai inovasi Anjungan Tele-Yanblik Mandiri BPOM (ATM BPOM), sebagai referensi dalam rencana integrasi layanan KemenHAM ke dalam penyelenggaraan MPP di daerah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran dari Jalan Kekuasaan Jokowi Menuju Pintu Keluar Istana

Oleh Redaksi · 14 Nov, 08.44 WIB



Oleh:Dr. Selamat Ginting

Pendahuluan

BERHENTINYA Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian pejabat dalam pemerintahan. Peristiwa ini merupakan babak akhir dari sebuah perjalanan Politik yang sejak awal menyimpan kontroversi mengenai dinasti kekuasaan, intervensi politik, perubahan aturan pencalonan, hingga persoalan persyaratan administratif seorang calon pemimpin nasional.

Karena itu, publik jangan hanya melihat pengunduran diri Gibran sebagai tindakan seorang negarawan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Ada rangkaian persoalan politik dan hukum yang perlu dibaca secara utuh.

Apalagi, jika benar pengunduran diri tersebut terjadi ketika pilihan politiknya semakin menyempit: dimundurkan melalui proses konstitusional atau mengundurkan diri sebelum menghadapi konsekuensi politik yang lebih besar.

Untuk memahami bagaimana Gibran bisa menjadi Wakil Presiden dan kemudian harus meninggalkan jabatan tersebut, kita perlu menarik kembali sejarah politik yang melatarbelakanginya.

Dinasti Jokowi dan Ambisi Mempertahankan Kekuasaan

Perjalanan politik Gibran menuju kursi Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejak 2021, publik menyaksikan munculnya dua figur keluarga Jokowi dalam kontestasi politik daerah. Gibran menjadi Wali Kota Solo, sedangkan menantunya, Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan. Keduanya merupakan bagian dari generasi penerus keluarga Jokowi yang mulai menempati posisi strategis dalam pemerintahan.

Pada periode yang sama, muncul pula wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Wacana tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh politik dan elite pemerintahan.

Nama Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti, hingga M. Qodari pernah dikaitkan dengan berbagai dinamika politik mengenai keberlanjutan kepemimpinan Jokowi.

Namun, gagasan tiga periode menghadapi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat dan kekuatan politik, termasuk Megawati Soekarnoputri.

Ketika peluang memperpanjang kekuasaan melalui perubahan masa jabatan semakin sulit, muncul persoalan lain: bagaimana mempertahankan pengaruh politik setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden?

Dalam perspektif politik kekuasaan, keberadaan anggota keluarga dalam jabatan strategis dapat menjadi salah satu instrumen mempertahankan pengaruh. Di sinilah posisi Gibran menjadi penting.

Tetapi, Gibran menghadapi satu kendala mendasar. Usianya belum mencapai 40 tahun, sementara Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun.

Dengan demikian, jalan menuju kursi Wakil Presiden membutuhkan perubahan aturan.

Prabowo dan Gibran: Benarkah Sebuah Lamaran Politik?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Komisi II DPRK Dorong Pemko Banda Aceh Optimalkan Instalasi SPALD-T Gampong Jawa

Oleh Redaksi · 13 Nov, 14.33 WIB

BANDA ACEH – Komisi II DPRK Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang berada di kawasan Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, tepatnya di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Ketua Komisi II DPRK M Zidan Al Hafidh, mendorong Pemko Banda Aceh untuk mengkaji dan meninjau lebih mendalam mengenai SPALD-T yang dibangun dengan anggaran pusat untuk warga Banda Aceh ini.

Katanya, SPALD-T merupakan fasilitas yang berfungsi mengolah limbah domestik dari masyarakat secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan kualitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan dan sumber air tanah.

Menurutnya, keberadaan SPALD-T seharusnya menjadi salah satu solusi pengelolaan limbah yang lebih aman dan terpadu. Bahkan, jika beroperasi secara optimal, fasilitas tersebut berpeluang memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah kota.

Namun, kata Zidan, pemanfaatan instalasi yang dibangun menggunakan anggaran APBN dengan nilai investasi sekitar Rp 200 miliar, termasuk kebutuhan lahannya, hingga kini belum berjalan maksimal.

Zidan menyebutkan, SPALD-T Banda Aceh memiliki kapasitas layanan hingga 5.000 pengguna. Akan tetapi, saat ini jumlah pelanggan yang memanfaatkan fasilitas tersebut baru sekitar 14 pengguna, di antaranya Polresta Balai Kota, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menjelaskan, salah satu kendala utama belum optimalnya operasional SPALD-T adalah belum tersedianya jaringan pipa sambungan rumah (SR) yang menghubungkan limbah domestik masyarakat dengan instalasi pengolahan tersebut.

Karena itu, Komisi II meminta Pemko Banda Aceh tidak hanya menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat, tetapi harus proaktif melakukan pendekatan dan koordinasi agar pembangunan jaringan pipa SR segera direalisasikan.

“Kami mendorong Pemko Banda Aceh melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat agar kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp 55 miliar hingga Rp 60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung. Dengan demikian, SPALD-T dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Zidan, Rabu (11/11/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kapolsek Hamili Tahanan Wanita Berstatus Istri Orang, Berkali-Kali Gituin Korban di Ruang Kanit Reskrim

Oleh Redaksi · 14 Nov, 09.38 WIB



BANDA ACEH - Kasus skandal asusila yang melibatkan mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, ternyata menyeret lebih banyak personel kepolisian.Tidak hanya sang mantan Kapolsek, dua anggota Polsek Dompu lainnya juga harus kehilangan karier mereka setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan.

Keduanya masing-masing berinisial Aiptu T dan Brigadir INAW.

Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), keduanya dinyatakan melakukan pelanggaran berat terkait kasus hubungan badan antara Ipda Sarbani dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR berstatus istri orang hingga mengakibatkan korban hamil.

Peran kedua anggota tersebut terungkap dalam sidang etik yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (9/11/2026).

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, menjelaskan Aiptu T dan Brigadir INAW memiliki peran berbeda dalam perkara tersebut.

Aiptu T dinyatakan terbukti melakukan persekongkolan sekaligus pembiaran terhadap hubungan badan yang dilakukan atasannya dengan tahanan perempuan.

Sementara Brigadir INAW terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas pengawasan tahanan.

"Penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga kehormatan dan integritas Polri. Seluruh keputusan diambil melalui pemeriksaan dan pertimbangan majelis KKEP berdasarkan ketentuan yang berlaku," kata Kholid, Kamis (12/11/2026).

Dengan keputusan tersebut, total tiga personel Polsek Dompu telah dijatuhi sanksi PTDH dalam skandal yang terjadi di lingkungan kantor kepolisian tersebut.

Namun, ketiga personel yang dijatuhi sanksi pemecatan itu masih memiliki hak untuk mengajukan banding.

Kholid membenarkan bahwa Ipda Sarbani, Aiptu T, dan Brigadir INAW telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding. Proses tersebut akan ditangani sesuai mekanisme internal Polri.

Hubungan Badan di Ruang Reskrim

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan kedekatan Ipda Sarbani dengan tahanan perempuan berinisial DR beredar di media sosial.

Peristiwa tersebut mencuat pada awal November 2026 setelah rekaman itu diunggah melalui akun Facebook Badai NTB Real, Senin (2/11/2026).

DR diketahui merupakan tahanan titipan Polres Dompu dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau ineks.

Dalam persidangan etik yang berlangsung sekitar delapan jam, mulai pukul 14.00 hingga 22.00 Wita, majelis menghadirkan 10 orang saksi.

Dari pemeriksaan tersebut, terungkap sejumlah pelanggaran yang dilakukan mantan Kapolsek Dompu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Kota Sabang Sambut Kunjungan Kerja Wakil Panglima TNI

Oleh Redaksi · 13 Nov, 18.12 WIB

SABANG – Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyambut kedatangan Wakil Panglima TNI yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah Sabang. Penyambutan berlangsung di VIP Room Lanud Maimun Saleh (MUS) Sabang, Jumat (13/11/2026).

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengawasan dan evaluasi operasi Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar dan Perbatasan (Satgaspam Puter), sekaligus menindaklanjuti rencana penandatanganan traktat perbatasan Republik Indonesia serta implementasi program Bangun Beranda Negeri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Butuh Wapres Berintegritas, Berpengalaman, dan Berjiwa Negarawan

Oleh Redaksi · 14 Nov, 09.02 WIB



0leh:Naek Pangaribuan

ADA peristiwa yang tidak pernah saya lupakan ketika meliput di depan Istana Merdeka, Jakarta, Juli 2001 silam. Saat itu, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur keluar dari Istana setelah diberhentikan MPR. Mengenakan kaus dan celana pendek didampingi putrinya Yenny Wahid, Gus Dur melambaikan tangan kepada masyarakat dan para pendukungnya.

Sebagai wartawan yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut dari balik pagar istana, saya melihat sebuah pelajaran penting yaitu jabatan bisa berakhir, tetapi penghormatan terhadap demokrasi dan kepentingan bangsa harus tetap dijaga.

Dua puluh lima tahun kemudian, Kamis 12 November 2026, suasana serupa kembali terjadi di lingkungan Istana. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wakil Presiden setelah menyatakan berhenti dari jabatannya.

Gibran dilepas sejumlah pegawai dan relawan yang berbaris di selasar Istana untuk bersalaman. Teriakan nama Gibran terdengar dari para pendukungnya sebelum ia menaiki mobil pribadi berwarna hitam meninggalkan tempat yang selama dua tahun menjadi pusat aktivitasnya sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Kedua peristiwa tersebut memiliki latar belakang dan mekanisme ketatanegaraan berbeda. Namun, keduanya mengingatkan bahwa jabatan publik bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Kini, setelah pengunduran diri Gibran, perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan, siapa yang akan menggantikannya?

Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar membutuhkan pendamping baru. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang berintegritas, berpengalaman, memahami pemerintahan, dan memiliki jiwa kenegarawanan.

Pengunduran Diri dan Tanggung Jawab Konstitusi

Pada Kamis 12 November 2026, Presiden Prabowo menerima langsung surat pernyataan berhenti Gibran di Istana Merdeka. Setelah itu, Gibran menyerahkan surat serupa kepada pimpinan MPR.

Presiden menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut. Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan.

Presiden menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta meninjau 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun pemerintahan.

Sementara itu, Gibran menegaskan bahwa keputusannya mundur merupakan keputusan pribadi setelah melalui pertimbangan panjang dan matang. Ia juga menyatakan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi perhatian publik.

Pernyataan tersebut perlu dihormati. Namun, karena menyangkut jabatan konstitusional, proses pengunduran diri dan pengisian jabatan pengganti harus berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Puan dan Pramono Masuk Bursa Pengganti Gibran, PDIP: Hal-hal Strategis Ditetapkan Ibu Ketum

Oleh Redaksi · 14 Nov, 13.31 WIB



BANDA ACEH -Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya menyerahkan keputusan strategis Partai kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap Politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

Menanggapi posisi Wakil Presiden yang kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur, Hasto kembali menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah kewenangan Ketua Umum PDIP.

"Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," tegasnya.

Hasto berharap terhadap dua nama yang nantinya diajukan merupakan sosok terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat saat ini.

"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai mencuatnya kabar dua nama kader PDIP dalam bursa calon wakil presiden, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Hasto kembali menegaskan hal strategis akan diputuskan oleh Megawati.

Hasto tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bahwa calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung paslon Prabowo-Gibran.

"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai kemungkinan wacana PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menyatakan hal tersebut merupakan ranah pimpinan tertinggi partai.

"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," katanya.

ACEH

Rektor UIN Ar-Raniry Paparkan Transformasi Digital PPID dalam Uji Publik KIP 2026

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.55 WIB

JAKARTA – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Prof Mujiburrahman memaparkan pengembangan layanan digital Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam presentasi di hadapan panelis KIP, Mujiburrahman yang juga bertindak sebagai Atasan PPID UIN Ar-Raniry menjelaskan sejumlah kebijakan dan inovasi yang telah dilakukan universitas untuk meningkatkan transparansi informasi serta memudahkan masyarakat mengakses informasi publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif atau sekadar mengejar hasil penilaian tahunan. Prinsip tersebut harus diterapkan dalam penyelenggaraan dan tata kelola perguruan tinggi.

"Keterbukaan informasi bukan sekadar untuk uji publik, tetapi denyut nadi tata kelola UIN Ar-Raniry secara berkelanjutan," ujar Mujiburrahman.

Salah satu langkah yang dipaparkan adalah pengembangan portal PPID melalui laman ppid.ar-raniry.ac.id yang mulai dirintis sejak 2025.

Pengembangan layanan tersebut diikuti peningkatan jumlah dokumen dalam Daftar Informasi Publik (DIP). Pada 2025, dokumen yang tersedia berjumlah 45, kemudian meningkat menjadi 74 dokumen pada 2026 atau bertambah 64 persen. Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga mengalami peningkatan. Dari sebelumnya empat informasi, kini tersedia 10 informasi atau bertambah 150 persen.

Sepanjang 2026, portal PPID UIN Ar-Raniry telah menerima dan melayani 11 permohonan informasi. Rata-rata waktu penyelesaiannya empat hari kerja.

Mujiburrahman mengatakan, pengembangan layanan digital harus diikuti dengan penyediaan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena itu, informasi publik perlu disajikan secara akurat, terbuka, dan mudah ditemukan.

Dalam tata kelola internal, keterbukaan tersebut antara lain diterapkan melalui proses penjaringan bakal calon rektor periode 2026–2030, penandatanganan pakta integritas pejabat, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Pada bidang keuangan, UIN Ar-Raniry meraih predikat satuan kerja dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Triwulan III Tahun 2025 dengan nilai 100.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Jepang Cemas Arah Kebijakan Trump di Indo-Pasifik

Oleh Syarifudin Brutu · 13 Nov, 15.23 WIB

TOKYO – Pemerintah Jepang meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di kawasan Indo-Pasifik menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, pada 18–19 November 2026.

Perhatian Tokyo tertuju pada langkah Presiden AS Donald Trump setelah hasil pemilu sela Amerika Serikat yang berlangsung 3 November 2026. Pemerintah Jepang menilai dinamika politik domestik Washington berpotensi memengaruhi prioritas diplomasi AS, termasuk dalam menentukan hubungan dengan China dan negara-negara sekutunya di kawasan Asia-Pasifik.

Kekhawatiran tersebut muncul menjelang pertemuan sejumlah pemimpin negara besar dalam agenda APEC. Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin diperkirakan menghadiri forum tersebut. Pertemuan mereka berpotensi membawa perkembangan baru dalam hubungan kekuatan besar dunia.

Pemerintah Jepang mengantisipasi kemungkinan Washington mengutamakan kesepakatan diplomatik dengan Beijing demi memperoleh keuntungan politik. Langkah semacam itu dikhawatirkan mengabaikan kepentingan negara-negara sekutu AS yang selama ini bergantung pada dukungan keamanan Washington.

Upaya Tokyo membaca arah kebijakan Gedung Putih terlihat melalui pertemuan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dengan Menteri …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dua Calon Wapres Ditagih MPR, Dasco dan Cak Imin Menguat?

Oleh Redaksi · 14 Nov, 08.41 WIB



BANDA ACEH – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini memasuki babak perebutan pengaruh Politik yang semakin menarik. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menggerakkan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Sementara Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan pilihannya, sejumlah tokoh mulai diperbincangkan sebagai calon penghuni Istana Wakil Presiden berikutnya.Rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026) menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kedua calon nantinya harus memenuhi persyaratan dan melalui proses verifikasi. Presiden diberi waktu 14 hari sejak menerima surat MPR untuk menyampaikan nama-nama tersebut.

Keputusan ini membuat bursa calon wapres memasuki tahap yang lebih serius, meskipun belum ada pencalonan resmi. Di antara sejumlah nama yang beredar, Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar menarik dicermati dari sudut konfigurasi kekuatan partai. Keduanya mewakili dua pilihan politik berbeda: mempertahankan kendali di lingkaran inti kekuasaan atau memperluas keseimbangan dalam koalisi pemerintahan.

Dua Nama, Dua Kalkulasi Politik

Sufmi Dasco Ahmad merupakan Wakil Ketua DPR sekaligus tokoh senior Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. Dalam konfigurasi DPR hasil Pemilu 2024, Gerindra memiliki 86 kursi dan menjadi kekuatan terbesar ketiga di parlemen. Kedekatan politik Dasco dengan partai Presiden menjadikannya figur yang relevan dalam analisis kesinambungan pemerintahan, meskipun belum ada bukti bahwa Prabowo telah memilihnya sebagai calon.

Jika Dasco masuk dalam dua nama yang diajukan, pilihan tersebut dapat dibaca sebagai upaya memperkuat koordinasi antara Presiden, kabinet, dan parlemen. Namun, langkah itu juga berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai pembagian kekuasaan di antara partai-partai pendukung pemerintah. Jabatan wakil presiden tentu bukan sekadar perpanjangan tangan sebuah partai, melainkan lembaga negara dengan tanggung jawab konstitusional.

Nama kedua yang patut diperhatikan adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Berbeda dengan Dasco, kemunculan namanya telah mendapat dukungan verbal dari seorang politikus partainya sendiri. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa PKB menginginkan Muhaimin sebagai wakil presiden, sembari menegaskan keputusan akhir masih menunggu proses yang berlangsung.

Kekuatan Parlemen Jadi Pertimbangan

PKB memiliki 68 kursi DPR berdasarkan hasil Pemilu 2024, sementara Gerindra menguasai 86 kursi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Brigjen TK Diperiksa Propam Polri, Ini Perkembangan Kasus Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 14 Nov, 13.40 WIB



BANDA ACEH - Divisi Propam Polri memeriksa Brigjen TK terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keterangan perwira tinggi tersebut juga didalami penyidik untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara itu.

"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Sabtu (14/11/2026).

Isir menjelaskan, pemeriksaan terhadap Brigjen TK tidak hanya dilakukan melalui mekanisme propam. Keterangannya juga menjadi bagian dari pendalaman penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta. Sanksi tersebut diputuskan melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.

Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh Politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut

Dalam perkara ini, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara.

Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki ancaman pidana maksimal 8 tahun

LIFESTYLE

Kekayaan Sekretaris Wantimpres M Qodari Tembus Rp300,59 Miliar

Oleh Redaksi · 13 Nov, 13.50 WIB

BANDA ACEH - Kekayaan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Qodari tercatat mencapai Rp300,59 miliar.

Sebagian besar harta tersebut berupa tanah dan bangunan yang nilainya menembus Rp195,38 miliar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan bersih Qodari mencapai Rp300.591.467.679 setelah dikurangi utang.

Sementara itu, total aset sebelum dikurangi utang tercatat sebesar Rp302.768.129.203.

Kekayaan tersebut berasal dari sejumlah komponen, mulai dari properti, kendaraan, harta bergerak lainnya, surat berharga, hingga kas dan setara kas.

- Tanah dan bangunan: Rp195.388.000.000
- Alat transportasi dan mesin: Rp1.828.000.000
- Harta bergerak lainnya: Rp18.007.200.000
- Surat berharga: Rp34.516.604.697
- Kas dan setara kas: Rp52.644.124.492
- Harta lainnya: Rp384.200.014
- Utang: Rp2.176.661.524

Dari keseluruhan aset tersebut, properti menjadi penyumbang terbesar kekayaan Qodari. Nilainya mencapai sekitar 64% dari total aset yang dilaporkan.

Qodari melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan di berbagai wilayah, antara lain Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Palangka Raya, Lombok Utara, Sukabumi, Bandar Lampung, Balikpapan, Pulang Pisau, hingga Lampung Utara.

Salah satu aset dengan nilai tertinggi berupa tanah dan bangunan di Jakarta Pusat seluas sekitar 780 meter persegi dengan nilai mencapai Rp56,7 miliar.

Di Depok, Qodari juga melaporkan bangunan seluas 2.700 meter persegi senilai Rp11,4866 miliar.

Ada pula bangunan seluas 2.183 meter persegi dengan nilai Rp9,2871 miliar.

Kepemilikan tanahnya juga mencakup lahan berukuran sangat luas di Palangka Raya.

Beberapa bidang tanah yang tercatat memiliki luas 90.275 meter persegi, 110.000 meter persegi, 560.000 meter persegi, hingga 670.000 meter persegi.

Tanah seluas 670.000 meter persegi tersebut dilaporkan bernilai sekitar Rp1,041 miliar.

Sementara tanah seluas 600.000 meter persegi tercatat bernilai Rp1,89 miliar. Ada pula bidang tanah dengan luas yang sama senilai Rp933 juta.

Dalam LHKPN, aset tanah dan bangunan tersebut dilaporkan sebagai hasil sendiri.

Selain properti, Qodari memiliki sejumlah kendaraan dengan total nilai Rp1,828 miliar.

Koleksi tersebut terdiri dari Toyota Kijang Innova 2.0 V AT tahun 2018 senilai Rp265 juta, Neta V-II tahun 2024 senilai Rp205 juta, Honda CMX500 Rebel tahun 2020 senilai Rp150 juta, serta Wuling Air EV Long Range tahun 2022 senilai Rp120 juta.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

TEKNOLOGI

Microsoft Down, 74 Negara Terdampak, Aktivitas Publik Terganggu

Oleh Syarifudin Brutu · 13 Nov, 14.50 WIB

Gangguan layanan digital Microsoft meluas ke sedikitnya 74 negara dan wilayah pada Kamis (12/11/2026) hingga Jumat (13/11/2026). Insiden yang melumpuhkan akses Microsoft 365, Outlook, dan Teams tersebut menghambat pekerjaan sektor pemerintahan, perbankan, pendidikan, hingga lembaga peradilan di sejumlah negara.

Meluasnya gangguan itu menunjukkan besarnya ketergantungan berbagai sektor terhadap infrastruktur digital Microsoft. Sejumlah aktivitas pekerjaan yang mengandalkan surat elektronik, komunikasi daring, dan aplikasi perkantoran tidak dapat berjalan normal selama layanan mengalami kendala.

Pada awalnya, Microsoft mengidentifikasi persoalan konektivitas tersebut terjadi di Amerika Serikat (AS). Namun, laporan pengguna yang terus bertambah memperlihatkan bahwa dampaknya tidak terbatas pada kawasan Amerika Utara, melainkan menjangkau berbagai wilayah internasional.

Berdasarkan pemantauan Downdetector, laporan gangguan tercatat dari 74 negara dan wilayah. Lonjakan juga terjadi di sejumlah negara, termasuk Inggris, India, dan Selandia Baru.

Dalam keterangannya melalui akun X pada Jumat (13/11/2026), Downdetector menyebut laporan gangguan di Inggris meningkat hingga sepuluh kali lipat. Lonjakan serupa juga terpantau di India dan Selandia Baru. Bahkan, hampir 30 persen laporan yang masuk dalam rentang pukul 17.00–18.55 UTC berasal dari luar Amerika Serikat.

Gangguan Meluas ke Sektor Pemerintahan dan Perbankan

Dampak pemadaman layanan Microsoft turut dirasakan di Australia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PKB Tak Usulkan Calon Wapres Pengganti Gibran: Berpikir Saja Tidak

Oleh Redaksi · 14 Nov, 08.51 WIB



BANDA ACEH - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak pernah mengusulkan Ketua Umumnya, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. PKB menegaskan, pengusulan calon Wakil Presiden merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, Sabtu (14/11/2026). Dia menyebut, sejak awal PKB lebih berfokus pada persoalan hukum dan konstitusi, termasuk polemik ijazah yang berkaitan dengan Gibran.

"Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal Hak Angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan," ujar Khozin dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Khozin menjelaskan, PKB selama ini menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pijakan dalam mengambil langkah Politik di parlemen. Menurutnya, sikap tersebut bertujuan mengakhiri polemik ijazah dan mengedepankan supremasi konstitusi.

"Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo," kata Khozin.

Dia berharap Presiden Prabowo dan MPR segera menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Langkah tersebut, menurutnya, perlu mengacu pada UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Khozin menilai penyelesaian polemik tersebut penting agar pemerintahan Prabowo dapat kembali berfokus menjalankan program-program kerakyatan dan mempercepat pencapaian Asta Cita.

"Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari Wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB Concern, 3 tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Asta Cita," tutur Khozin.

Lebih lanjut, Khozin kembali menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan di internal PKB mengenai kemungkinan Cak Imin mengisi posisi wakil presiden. Dia mengatakan, partainya justru lebih memprioritaskan penyelesaian polemik ijazah agar pemerintah bisa menjalankan programnya secara optimal.

"Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan," ucapnya

NASIONAL

Kapolda Jabar Hengki: Saya Tidak Butuh Polantas Sibuk Kosongkan Jalan Saat Pimpinan Melintas

Oleh Redaksi · 14 Nov, 13.45 WIB



BANDA ACEH -Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa anggota polisi lalu lintas (Polantas) harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan sibuk mengatur arus kendaraan demi kelancaran perjalanan pejabat atau pimpinan yang melintas.

Penegasan tersebut disampaikan Hengki saat memberikan arahan dalam Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun 2026.

Di hadapan jajaran lalu lintas, Hengki secara tegas mengingatkan bahwa keberhasilan anggota Polantas tidak boleh diukur dari kemampuan mereka mengosongkan jalan ketika Kapolda atau pimpinan lainnya melintas.

"Saya tidak butuh anggota yang sibuk mengatur lalu lintas hanya karenA Kapolda melintas. Saya butuh anda hadir untuk melayani masyarakat di jalan raya," tegas Hengki dalam Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas pada hari Kamis, 5 Agustus 2025 di Aula Ditlantas Polda Jabar.

Menurut Hengki, kehadiran anggota Polantas di jalan raya harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Polisi lalu lintas dituntut hadir untuk mengurai kemacetan, membantu korban kecelakaan, memberikan rasa aman, serta memastikan pengguna jalan dapat mencapai tujuan dengan selamat.

Ia menekankan agar anggota tidak lebih sibuk melayani kepentingan pimpinan hingga melupakan tugas utama sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Jangan sibuk melayani pimpinan, sampai lupa siapa yang seharusnya kita layani," ujarnya.

Hengki juga mengingatkan bahwa jalan raya merupakan ruang publik yang harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan secara adil. Menurutnya, fasilitas jalan tidak seharusnya diperlakukan istimewa hanya untuk kepentingan perjalanan pejabat.

"Karena jalan raya bukan untuk diistimewakan bagi pejabat, tetapi untuk memberikan pelayanan dan keselamatan bagi seluruh masyarakat," katanya.

Ia berharap seluruh jajaran Polantas di Jawa Barat dapat menjadikan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas.

"Polantas harus menjadi solusi, bukan sekadar simbol kehadiran," tutup Hengki.

NASIONAL

Cerita Prabowo soal Yandri yang Ngotot Jadi Menteri Desa, Awalnya Jatah Bahlil

Oleh Redaksi · 14 Nov, 20.40 WIB





BANDA ACEH - Presiden RI Prabowo Subianto berkelakar banyak pejabat menteri Kabinet Merah Putih yang berwajah Muhammadiyah.Hal ini disampaikan Prabowo ketika menyapa sejumlah pejabat negara dalam acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

Mulanya, Prabowo menyapa para pejabat yang hadir, termasuk Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia pun menyebut penampilan Zulhas sudah selayaknya anggota Muhammadiyah.

"Menteri Koordinator Pangan, Saudara Zulkifli Hasan. Mukanya agak Muhammadiyah juga ini," kata Prabowo.

Kemudian ia lanjut menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Di mana, Brian juga merupakan pimpinan Muhammadiyah cabang Bandung.

"Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sekaligus pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Bandung, Profesor Brian Yuliarto. Ini Muhammadiyah ada di mana-mana ini," ujarnya.

NASIONAL

Kronologi Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi di Rumah Dinas

Oleh Redaksi · 14 Nov, 09.09 WIB



BANDA ACEH - Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Peristiwa itu diduga terjadi di rumah jabatan (rujab) Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.00 Wita.Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT yang diperoleh detikBali, dugaan pemerkosaan itu bermula saat seorang perempuan berinisial EK mengajak RWM ke rumah dinas Bupati Kupang dengan iming-iming pekerjaan.

Setibanya di lokasi, Yosef Lede disebut menyuruh EK keluar sehingga dia hanya berdua dengan RWM di dalam rumah. Selanjutnya, politikus Partai Gerindra itu diduga mencabuli RWM dan menariknya ke dalam kamar tidur.

Perempuan kelahiran 13 Januari 2005 itu kemudian diduga diperkosa dua kali. Pemerkosaan pertama disebut terjadi sekitar pukul 20.00 Wita. Dalam kondisi ketakutan, RWM kemudian menghubungi seorang saksi, STM (20), untuk menjemputnya.

Selanjutnya, dugaan pemerkosaan kedua terjadi sekitar pukul 00.00 Wita. Setelah kejadian tersebut, Yosef Lede disebut memasukkan uang senilai Rp 3 juta ke dalam tas milik RWM dan menyuruhnya keluar dari ruangan.

Namun, setelah berada di luar ruangan, EK mengancam RWM akan memutus hubungan kekeluargaan dan persahabatan jika menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun.

"Saksi juga mengambil uang yang berada di dalam tas korban sebanyak Rp 3 juta," demikian bunyi keterangan dalam laporan polisi, dikutip detikBali, Jumat (12/11/2026).

Setelah itu, RWM meminta saksi STM menjemputnya untuk pulang ke rumah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan oleh ibu kandung RWM, FMT (42), ke SPKT Polda NTT untuk diproses secara hukum.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, mengaku sedang mengikuti kegiatan pengarahan dari Bareskrim Polri di Jakarta.

"Saya masih di Jakarta ikut giat pengarahan dari Bareskrim. Dapat dari siapa LP tersebut," ujar Nova singkat saat dikonfirmasi detikBali terkait laporan polisi tersebut.

Sementara itu, Yosef Lede, hingga kini belum memberi keterangan. Begitu juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang Mateldius Sanam dan Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eky. Mereka tidak merespons permintaan konfirmasi detikBali melalui panggilan telepon maupun pesan WhatsApp.

NASIONAL

Aktivis hingga Mantan Panglima TNI Hadiri Pemakaman Rizal Fadillah Tersangka Kasus Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 14 Nov, 13.35 WIB



BANDA ACEH - Suasana duka menyelimuti pemakaman Muhammad Rizal Fadillah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Astana Anyar, Kota Bandung, Sabtu (14/11/2026) pagi. Aktivis sekaligus Pengamat Politik yang menjadi tersangka dalam kasus terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut meninggal dunia pada Jumat (13/11/2026) di usia 66 tahun.

Jenazah almarhum diantar keluarga, kerabat dan sejumlah tokoh untuk dimakamkan di TPU Astana Anyar. Sejumlah tokoh nasional turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan dan isu Politik tersebut.

Rizal mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Bandung. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga dan rekan-rekan seperjuangan.

Semasa hidup, Rizal dikenal sebagai aktivis, pengamat politik serta Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) . Namanya juga menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara terkait ijazah Jokowi.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan aktivis Said Didu turut hadir dalam prosesi pemakaman. Keduanya memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum bersama sejumlah pelayat lainnya.

"Aktivis yang multitalenta, beliau bukan hanya teriak-teriak saja tapi beliau juga membuktikan turun ke lapangan hingga 16 April 2025 ke Jokowi dan meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya dan beliau juga seorang penulis yang tersebar di berbagai media," ujar Gatot.

Prosesi pemakaman berlangsung khidmat hingga jenazah dikebumikan di TPU Astana Anyar, Kota Bandung. "Contoh pejuang yang kosisten dalam melakukan perjuangan kebenaran dan tidak pernah goyah sedikitp pun. Kami kehilangan komandan, pejuang dan contoh yang betul-betul istikamah dalam perjuangan," ucap Said Didu

NASIONAL

Rizal Fadilah Meninggal, Roy Suryo Ungkap Pesan Haru Kehilangan Rekan Seperjuangan

Oleh Redaksi · 14 Nov, 10.04 WIB



BANDA ACEH - Roy Suryo menyampaikan kabar duka atas meninggalnya Muhammad Rizal Fadilah, salah satu tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Rizal meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah dan menjalani perawatan intensif di ruang ICU.

Roy mengaku kehilangan sosok sahabat sekaligus rekan seperjuangan yang sejak awal bersamanya mengungkit persoalan dugaan ijazah Jokowi. Kabar meninggalnya Rizal diketahui Roy pada Jumat (13/11/2026).

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru saja saya mendengar kabar duka bahwa salah seorang sahabat, pejuang di antara kita, telah meninggal dunia, wafat dipanggil Sang Khalik," kata Roy, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Roy menyebut Rizal merupakan salah satu orang yang sejak awal terlibat bersama dirinya, dr Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa, dan sejumlah pihak lainnya dalam mengungkit dugaan ijazah Jokowi.

Menurut Roy, kondisi kesehatan Rizal memburuk pada Jumat (13/11/2026). Almarhum dilarikan ke rumah sakit setelah menunaikan salat Jumat dan langsung mendapatkan perawatan intensif.

"Almarhum Ustaz Rizal Fadilah diketahui siang hari tadi selepas Jumatan dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah dan langsung masuk ke ICU atau Intensive Care Unit di sana. Dan tidak lama kemudian, menjelang sore, beliau sudah dipanggil oleh Yang Mahakuasa. Dan dengan ini kita berharap husnul khatimah. Amin," katanya.

Roy juga menyampaikan penghormatan terakhir kepada Rizal. Dia berharap perjuangan yang selama ini dilakukan almarhum dapat diteruskan oleh rekan-rekan seperjuangannya.

"Selamat jalan Ustaz Rizal Fadilah. Perjuanganmu tentu akan terus kita teruskan dan rakyat Indonesia sangat bangga dengan perjuangan Ustaz Rizal Fadilah yang terus berjuang menegakkan kebenaran dan tidak kemudian berbelok atau kemudian putus di tengah jalan," katanya.

Diketahui, Rizal Fadilah merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi. Sejumlah nama lain yang disebut sebagai tersangka dalam perkara tersebut di antaranya Roy Suryo, dr Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa, Kurnia Tri Rohyani, dan Rustam Effendi.

Roy Suryo menyampaikan duka atas meninggalnya Muhammad Rizal Fadilah, rekan seperjuangannya dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi

NASIONAL

Beathor Suryadi Sebut Pramono Anung Sosok Tepat jadi Wapres, Ini Alasannya

Oleh Redaksi · 14 Nov, 10.05 WIB



BANDA ACEH - Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, menilai Dr. Ir. Pramono Anung, MBA, merupakan sosok yang tepat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.Menurut Beathor, Pramono memiliki keunggulan Politik yang tidak dimiliki banyak tokoh lainnya. Ia memahami karakter tiga tokoh penting dalam percaturan politik nasional, yakni Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Beathor menilai pengalaman panjang Pramono di lingkungan pemerintahan dan lingkaran kekuasaan menjadi modal penting untuk membangun komunikasi di antara ketiga tokoh tersebut.

“Pramono Anung memahami karakter Jokowi karena dua periode berada di kabinet Istana. Dia juga memahami karakter Prabowo karena lima tahun bersama dalam kabinet. Selain itu, Pramono juga memahami karakter Megawati,” kata Beathor kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Bagi Beathor, kombinasi pengalaman tersebut menjadikan Pramono sebagai figur yang berpotensi menjadi penghubung komunikasi politik antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati.

Posisi tersebut dinilai penting di tengah dinamika politik nasional yang membutuhkan komunikasi lintas kekuatan politik. Terlebih, hubungan antara para tokoh tersebut memiliki pengaruh besar terhadap arah pemerintahan dan stabilitas politik Indonesia.

Beathor melihat Pramono bukan hanya memiliki pengalaman birokrasi, tetapi juga memahami karakter, pola komunikasi, serta dinamika politik di antara para pemimpin nasional.

Dengan modal tersebut, Pramono dinilai dapat memainkan peran strategis dalam menjembatani perbedaan pandangan dan membangun komunikasi yang lebih konstruktif.

Pernyataan Beathor ini sekaligus memunculkan perspektif menarik tentang pentingnya figur penghubung dalam pemerintahan Prabowo. Di tengah beragam kepentingan politik, kemampuan membaca karakter para pemimpin dan menjaga komunikasi lintas kekuatan menjadi modal yang tidak bisa diabaikan.

“Salam Juang,” tutup Beathor Suryadi.

NASIONAL

Viral Orang Berbaju Hitam Naik Truk Polisi Saat Ricuh Jogja, Polda DIY Sebut Itu Anggota Reserse

Oleh Redaksi · 14 Nov, 12.01 WIB



BANDA ACEH — Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membantah narasi yang menyebut anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) menumpangi truk polisi saat kericuhan di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Kepolisian memastikan orang-orang berpakaian hitam dalam rekaman video viral di kawasan Tugu Jogja tersebut merupakan personel reserse yang bertugas secara tertutup.Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan, personel tersebut tergabung dalam Satuan Tugas Patroli Siaga Reserse (Satgas Pagar) Polda DIY. "Untuk yang pakaian preman naik truk, betul itu anggota kepolisian atau Polda yaitu masuk dalam Satgas Pagar, Patroli Siaga Reserse. Jadi itu bukan ormas ya," ujar Novita di Mapolda DIY, Jumat (13/11/2026).

Novita menerangkan, Satgas Pagar beranggotakan 858 personel. Mereka sengaja mengenakan pakaian preman untuk menjalankan pola pengamanan tertutup. Tim tersebut diterjunkan atas perintah Kapolda DIY saat kericuhan pecah di depan Gedung DPRD DIY sekitar pukul 20.00 WIB hingga meluas ke kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM). Padahal, massa unjuk rasa sebelumnya telah membubarkan diri pada pukul 18.30 WIB.

Penggunaan kendaraan dinas berupa truk kepolisian dilakukan secara situasional. Langkah itu ditempuh untuk mempercepat pergeseran personel ke sejumlah titik penyebaran massa setelah upaya pembubaran oleh aparat Brimob dan Sabhara. "Otomatis kita juga harus menyebar beberapa anggota di beberapa titik, untuk percepatan memang kita menggunakan kendaraan-kendaraan dinas," jelas Novita.

NASIONAL

Enak Banget Gibran Mundur Bukan Dimakzulkan

Oleh Redaksi · 14 Nov, 08.47 WIB



BANDA ACEH -Persoalan Gibran Rakabuming Raka tidak boleh diselesaikan semata-mata melalui pengunduran diri dari jabatan Wapres.

Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) serta berbagai persoalan hukum terkait persyaratan jabatan Wapres harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional demi menjaga kehormatan konstitusi dan supremasi hukum.

Khozinudin memandang DPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menindaklanjuti aspirasi dan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

"Proses tersebut harus dilakukan secara transparan, objektif, dan menyeluruh hingga menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara," kata Khozinudin, dikutip Sabtu 14 November 2026.

Ia juga mendesak DPR menindaklanjuti usulan sejumlah anggotanya untuk menggunakan HMP terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, ia menuntut MPR tidak menjadikan pengunduran diri sebagai jalan pintas penyelesaian persoalan konstitusional. Hak pensiun dan fasilitas negara bagi mantan pejabat harus ditentukan berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku.

Berikutnya, mendesak penyelesaian melalui mekanisme pemakzulan konstitusional. Apabila terbukti memenuhi alasan pemberhentian berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, Gibran harus diberhentikan melalui proses Pasal 7B, dengan konsekuensi tidak mendapatkan hak keuangan dan fasilitas negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami juga tetap akan melanjutkan proses hukum terhadap Gibran Rakabuming Raka di Bareskrim Mabes Polri sekalipun dia telah diberhentikan dari jabatan Wapres," kata Khozinudin.

"Karena setiap pelanggaran hukum, harus diberikan sanksi pidana agar kedepan bangsa Indonesia tidak bersikap permisif terhadap berbagai penyimpangan hukum dan konstitusi," sambungnya.

NASIONAL

Gibran dan Jokowi Sulit Bangkit untuk Kembali Melawan

Oleh Redaksi · 14 Nov, 08.37 WIB



BANDA ACEH -Jangankan Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur saja yang ketika itu masih didukung PKB dan Nahdlatul Ulama (NU), begitu dijatuhkan dari kekuasaan, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan perlawanan.

Demikian pandangan analis Politik Saiful Huda Ems, dikutip Sabtu 14 November 2026.

"Nah Gibran didukung siapa? PSI ya teramat kecil sekali dan sudah banyak ditinggal pergi oleh politisi-politisi andalannya," kata Saiful.

Menurut Saiful, ayah kandung Gibran, Joko Widodo alias Jokowi sudah tidak punya jabatan apa-apa lagi, selain jadi raja-rajaan.

"Relawannya pun tidak sebanyak di tahun 2014 atau 2019 yang mana dulu PDIP masih berada di belakangnya," kata Saiful.

Saiful menegaskan bahwa sekarang ini Gibran maupun Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi.

"Maka ketika Gibran turun ataupun diturunkan, tidak akan punya lagi kekuatan apa-apa untuk bangkit kembali apalagi melakukan perlawanan," kata Saiful.

Gibran maupun Jokowi, kata Saiful, bukanlah tokoh politisi selevel Gus Dur atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang besar dan hebat karena proses panjang tempaan perjuangan hidupnya.

"Jadi, ya terima saja kenyataan politik yang terjadi saat ini dan pendukung Gibran maupun Jokowi tidak perlu lagi kecewa dan marah-marah," pungkas Saiful.

NASIONAL

Puan Masuk Bursa Cawapres, Ini Sikap Bambang Pacul

Oleh Redaksi · 14 Nov, 08.58 WIB



BANDA ACEH -Ketua DPR Puan Maharani dikabarkan masuk bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul enggan berkomentar banyak.

Bambang menegaskan bahwa kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau cawapres yang akan dikirim kepada kami di MPR, itu domain penuh Pak Presiden. Itu domainnya di Pak Presiden,” kata Bambang kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Ia pun menyarankan pihak-pihak yang ingin mendorong nama tertentu agar melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo maupun orang-orang dekatnya.

“Jadi kalau sampeyan lobinya, lobi lah kepada Pak Presiden atau orang kawan-kawan dekat Pak Presiden,” kata Bambang.

Saat ditanya apakah PDIP akan memberikan usulan nama calon pengganti Gibran, Bambang menyebut hal tersebut merupakan kewenangan internal masing-masing organisasi partai.

Namun, ia menegaskan tidak berada pada posisi untuk mewakili sikap resmi PDIP terkait pengusulan nama calon Wakil Presiden.

“Kalau di sini saya, saya masih bisa bicara. Tapi kalau partai, itu bukan domain saya. Oke,” demikian Bambang.

ACEH

3 BERITA

ACEH

Aceh Barat Usulkan Jalan Ateung Teupat Jadi Jalan Nasional

Oleh Biro Meulaboh · 14 Nov, 14.58 WIB



Sekda Aceh Barat, Dr.Ir Kurdi, ST,MT, FOTO/ist

MEULABOH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat terus mengupayakan penanganan Jalan Ateung Teupat di jalur Meulaboh–Kuala Bhee yang kerap terendam banjir saat musim hujan. Untuk merealisasikan pembangunan ruas jalan tersebut, dibutuhkan anggaran hampir Rp100 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, S.T., M.T., M.H., mengatakan dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) pembangunan jalan tersebut telah tersedia. Namun, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran.

Hal itu disampaikan Kurdi saat menjawab pertanyaan anggota DPRK Aceh Barat dalam Rapat Paripurna Ke-VII Masa Sidang Ke-III Tahun 2026 terkait pembahasan dan penetapan Rancangan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027, Jumat (13/11/2026).

Menurut Kurdi, persoalan Jalan Ateung Teupat telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan masuk dalam pembahasan induk kebencanaan bersama Bappeda Aceh serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Meski perencanaan teknis telah rampung, dukungan anggaran belum memenuhi kebutuhan yang diusulkan. Karena itu, diperlukan dorongan politik agar penanganan jalan tersebut mendapat persetujuan dan dukungan pendanaan yang memadai.

“Dari segi efektivitas penanganan sebenarnya cukup efektif. Namun, anggaran yang tersedia belum memenuhi pagu yang kita usulkan. Karena itu, diperlukan dorongan yang lebih kuat, terutama melalui keputusan politik, mengingat kebutuhan anggarannya cukup besar,” ujar Kurdi.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Barat juga mengusulkan peningkatan status Jalan Ateung Teupat, yang memiliki panjang sekitar dua kilometer, dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Kurdi menyebutkan, Gubernur Aceh telah menyurati Bappenas terkait usulan tersebut. Koordinasi dengan Kepala Bappenas juga telah dilakukan untuk membahas percepatan perubahan status jalan.

Menurutnya, peningkatan status menjadi jalan nasional berpotensi membuka peluang pendanaan yang lebih besar sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dapat dilakukan secara optimal.

Ia menjelaskan, penetapan status jalan dilakukan setiap lima tahun. Dengan keputusan terbaru diterbitkan pada 2024, pemerintah masih memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk mempersiapkan proses pengusulan perubahan status tersebut.

Melalui upaya penguatan anggaran dan perubahan status jalan, Pemkab Aceh Barat berharap persoalan Jalan Ateung Teupat yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera ditangani.

Kurdi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan dukungan agar pembangunan infrastruktur di Aceh Barat dapat berjalan lebih optimal.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

Sekda Aceh Barat Ajak Pemuda Tolak Politik Transaksional

Oleh Biro Meulaboh · 14 Nov, 17.08 WIB



Sekda Aceh Barat, Kurdi, saat membuka sosialisasi pendidikan politik bagi pemuda di Aula Cabang Dinas Pendidikan, Sabtu (14/11/26),FOTO/HAI

MEULABOH– Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH, mewakili Bupati Aceh Barat membuka kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemuda yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Aula Cabang Dinas Pendidikan setempat, Sabtu (14/11/2026).

Dalam sambutannya, Kurdi menegaskan pendidikan politik penting untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang demokrasi sekaligus membangun kesadaran politik yang sehat, cerdas, dan berintegritas.

Menurutnya, demokrasi bukan sekadar proses pemilihan atau perolehan suara, melainkan harus dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas demi melahirkan kepemimpinan serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Ia mengingatkan generasi muda, khususnya pemilih pemula, agar menggunakan hak pilih secara bijak dan tidak mudah terpengaruh ajakan orang lain maupun imbalan sesaat.

"Jangan sampai pilihan kita ditentukan oleh keuntungan sesaat, sementara masa depan daerah dan kepentingan masyarakat justru menjadi taruhannya," tegas Kurdi.

Kurdi juga mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi yang harus disikapi secara dewasa tanpa mengorbankan persaudaraan dan persatuan.

Selain itu, ia meminta pemuda mampu menyaring informasi di tengah derasnya arus teknologi dan media sosial agar tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.

Ia berharap pemuda Aceh Barat dapat tampil sebagai generasi yang tidak hanya memiliki semangat, tetapi juga berpengetahuan, berintegritas, serta peduli terhadap pembangunan daerah.

"Masa depan Aceh Barat turut ditentukan oleh apa yang kita persiapkan dan lakukan hari ini," pungkasnya.[]

Editorial : Biro Meulaboh

ACEH

Kunjungi Korban Banjir Pijay, Kak Na Ingatkan Petugas Pantau Kelompok Rentan

Oleh Redaksi · 14 Nov, 01.19 WIB



PIDIE JAYA – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh Marlina Usman, ingatkan petugas di setiap posko pengungsian banjir untuk terus memantau kondisi kesehatan kelompok rentan, mulai dari Lansia, perempuan, ibu hamil, anak-anak dan balita.

Hal tersebut ditegaskan oleh perempuan yang akrab disapa Kak Na itu, saat meninjau dan menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak banjir, di sejumlah posko pengungsian di Kecamatan Meureudu, Jum'at (13/11/2026).

"Kelompok rentan harus mendapat perhatian lebih, pantau terus kondisi kesehatannya dan beri suplemen penunjang agar kelompok ini tidak mudah diserang penyakit," kata Kak Na.

Pada kesempatan tersebut, Kak Na juga mengimbau warga untuk tetap sabar dan tabah dalam menghadapi bencana ini.

"Luka lama masih belum pulih, tapi masyarakat kembali mendapat cobaan yang sama, kami harap bapak dan ibu terus bersabar dan tabah. Pemerintah di semua tingkatan masih terus berusaha melakukan berbagai upaya pemulihan," ucapnya.

Di Pidie Jaya, dia meninjau dua lokasi pengungsian, yaitu di Meunasah Pante Beureune dan Masjid Agung Tgk Chiek Pante Geulima.

Kak Na didampingi Ketua Gekraf Aceh Sunil Iqbal serta Ketua TP PKK Pidie Jaya Asmawati Sibral Malasyi dan Ketua TP PKK Pidie Rohana, turut menyerahkan bantuan berupa Beras, minyak goreng, mie instan, selimut, sarung, handuk, mukena, baju, jilbab, masker dan biskuit.

Pada kunjungan tersebut, Kak Na turut membawa tim medis dari Dinas Kesehatan Aceh untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat serta membawa obat-obatan.

Seperti biasa, untuk anak-anak di lokasi pengungsian, Kak Na dan rombongan turut membagikan sebungkus biskuit dan sekotak susu.

Pada kunjungan tersebut, dia juga sempat singgah ke kediaman Mukhtar di Gampong Meunasah Lhok. Pria 46 tahun tersebut mengalami cacat permanen pasca mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Indrapuri Aceh Besar 15 tahun lalu.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Sekretaris Daerah Pidie Jaya Munawar Ibrahim, pada kesempatan tersebut mengapresiasi perhatian Ketua TP PKK Aceh yang telah menyempatkan waktu bekunjung dan menyerahkan bantuan untuk warga terdampak banjir di wilayahnya. []

INTERNASIONAL

3 BERITA

INTERNASIONAL

Ribuan Robot Perusahaan Dukungan Putra Trump Disiapkan untuk Perang di Terowongan Gaza?

Oleh Redaksi · 14 Nov, 14.58 WIB



BANDA ACEH - Sebuah perusahaan rintisan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang pengembangan robot humanoid dan mendapat dukungan Eric Trump, putra Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tengah melakukan pembicaraan dengan militer Israel untuk memasok hingga 1.000 robot yang akan digunakan di terowongan-terowongan Gaza.Robot tersebut bahkan berpotensi dilibatkan dalam operasi tempur, demikian laporan surat kabar Inggris Financial Times, dikutip Aljazeera, Sabtu (14/11/2026).

Surat kabar tersebut mengutip pernyataan Mike LeBlanc, salah satu pendiri sekaligus CEO perusahaan Foundation Future Industries.

Ia mengatakan bahwa dirinya telah mengadakan pertemuan awal dengan sejumlah pejabat tinggi militer Israel pada September lalu.

Dalam kunjungan tersebut, LeBlanc meninjau sejumlah terowongan di Gaza bersama robot buatan perusahaannya yang bernama Phantom MK1.

Ia juga mengonfirmasi kepada Financial Times bahwa perusahaannya sedang melakukan pembicaraan langsung dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, terkait pengadaan robot tersebut.

Negosiasi ini berlangsung meskipun Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya pada tahun ini mengakui bahwa lebih dari 80 persen terowongan yang dibangun oleh Gerakan Perlawanan Islam Hamas telah dihancurkan di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel sejak Operasi Badai Al-Aqsa pada Oktober 2023.

Surat kabar Inggris The Telegraph memperkirakan harga satu unit robot tersebut mencapai sekitar 150 ribu dolar AS.

Dengan demikian, pengadaan 1.000 unit dapat bernilai hingga 150 juta dolar AS apabila kesepakatan itu direalisasikan sesuai jumlah maksimal yang sedang dinegosiasikan.

Menurut LeBlanc, robot-robot tersebut sepenuhnya dapat beroperasi secara mandiri. Kemampuannya mencakup berbagai tugas, antara lain mendeteksi jebakan dan menangani bahan peledak.

Kemampuan militer phantom

Sebelumnya, dua unit robot Phantom MK1 telah dikirim ke Ukraina pada Februari 2026 untuk diuji dalam sejumlah tugas, seperti pengintaian di garis depan pertempuran, pengiriman pasokan, serta dukungan logistik. Demikian dilaporkan The Telegraph.

Namun, ambisi Foundation Future Industries tidak terbatas pada pengembangan robot humanoid untuk keperluan pengintaian dan dukungan logistik.

Perusahaan tersebut menegaskan bahwa robot Phantom dirancang khusus untuk aplikasi pertahanan sekaligus serangan.

Mike LeBlanc menyebut pertempuran sebagai salah satu tugas "paling mulia" yang dapat dilakukan robot-robot tersebut pada masa depan.

Dalam laporan yang diterbitkan pada Maret lalu, majalah Amerika Serikat Time menyebutkan bahwa robot tersebut telah menjalani serangkaian pengujian menggunakan berbagai jenis senjata, termasuk pistol …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

WNI yang Jadi Tentara Bayaran Rusia Ternyata Pengangguran hingga Mantan Admin Judol di Kamboja

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.30 WIB



BANDA ACEH - Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa belasan warganya pergi ke luar negeri untuk menjadi tentara bayaran Rusia. Parahnya, mereka bahkan sama sekali tidak memiliki rekam jejak di dunia kemiliteran maupun kepolisian, melainkan warga sipil biasa mulai dari pengangguran hingga mantan admin judi online (judol).Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol. Nasriadi menjelaskan bahwa para korban umumnya merupakan masyarakat yang tengah terhimpit kesulitan ekonomi. Sindikat sengaja menyasar warga berusia produktif di bawah 50 tahun yang sedang membutuhkan pekerjaan.

"Mereka rata-rata mantan admin judi online di luar negeri, contohnya di Kamboja. Selain itu, ada yang bekerja serabutan, pengangguran, karyawan swasta, buruh pabrik, hingga buruh harian lepas. Jadi sama sekali tidak ada yang berbasis militer atau polisi," ungkap Nasriadi dikutip Sabtu (14/11/2026).

Menurut Nasriadi, kelompok usia yang menjadi sasaran empuk perekrut bukan kalangan remaja, melainkan anak-anak muda yang secara fisik dinilai sehat untuk diterjunkan ke zona konflik.

Demi mengelabui petugas, para korban diberangkatkan menggunakan visa kunjungan atau visa wisata, bukan visa kerja resmi.

Faktor himpitan ekonomi membuat para korban tersebut mudah tergiur oleh iming-iming fantastis yang ditawarkan jaringan perekrut. Mereka dijanjikan gaji sebesar Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan dengan nilai kontrak mencapai Rp400 juta untuk durasi kerja satu tahun.

Namun, realitas di lapangan berbanding terbalik dengan janji manis sindikat. Setibanya di wilayah konflik, para korban diduga terikat kontrak seumur hidup dan tidak bisa pulang ke Tanah Air.

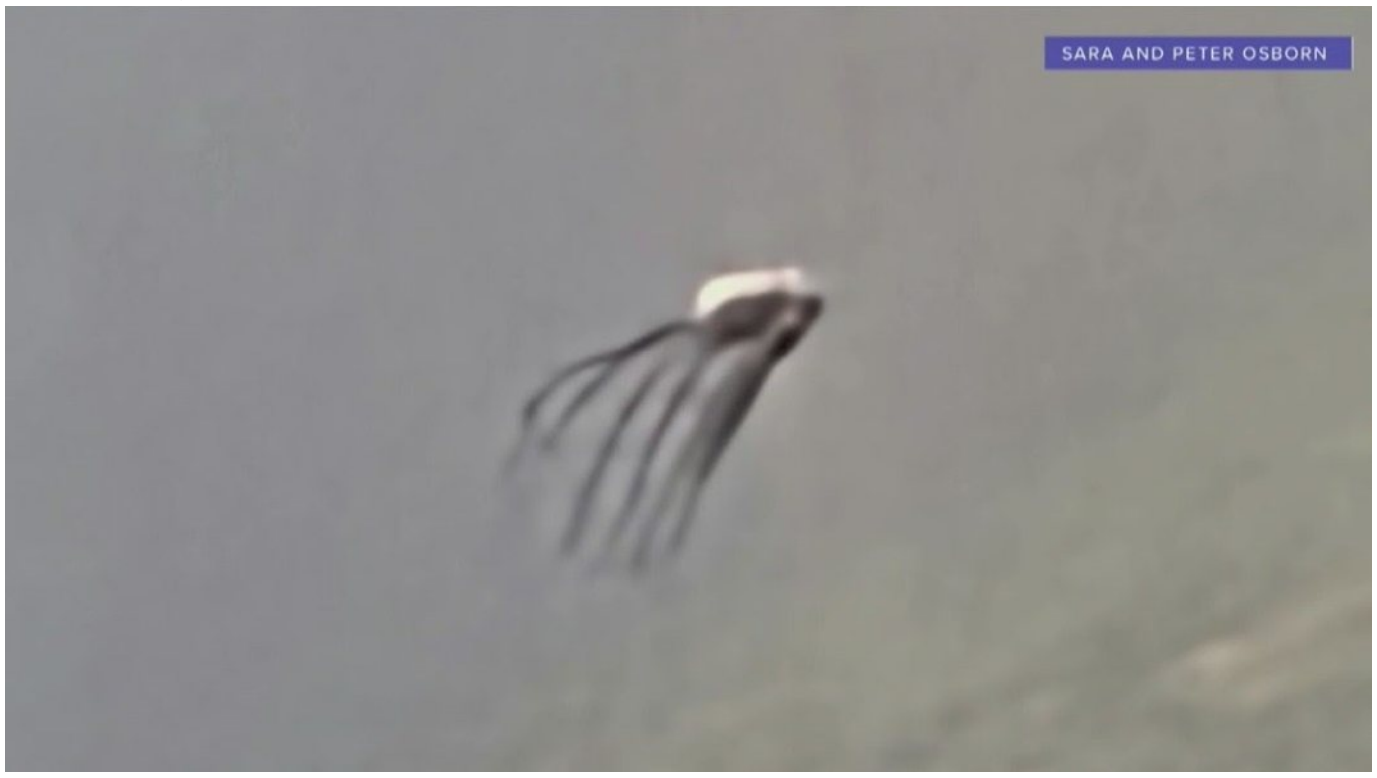
Dari total 23 WNI yang berhasil dijaring sindikat ini, tercatat sudah ada 15 orang yang lebih dulu diberangkatkan ke Rusia.

"Kami yakin masih banyak jaringan lain yang belum terungkap. Karena itu, kami mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran penghasilan besar untuk menjadi tentara bayaran. Risikonya sangat besar dan mereka bisa menjadi korban di garis depan peperangan," tegas Nasriadi.

INTERNASIONAL

Semua Penerbangan di AS Digrounding: Muncul Klaim UFO di Media Sosial

Oleh Redaksi · 14 Nov, 16.26 WIB



BANDA ACEH - Seluruh penerbangan domestik di Amerika Serikat sempat digrounding secara nasional pada Jumat, 13 November 2026, setelah Federal Aviation Administration (FAA) mengeluarkan perintah ground stop karena “extraordinary circumstances” dan alasan keselamatan.Perintah tersebut berlaku sekitar pukul 15.54 EST dan berlangsung lebih dari empat jam—terlama sejak serangan 11 September 2001. Ribuan penerbangan dibatalkan dan ditunda, dengan lebih dari 8.000 pembatalan dan ribuan keterlambatan menurut data FlightAware dan Flightradar24. Pesawat yang sudah di udara diizinkan mendarat, sementara penerbangan internasional ditangani secara kasus per kasus.

Penyebab Resmi: Gangguan Telekomunikasi

Menurut Sekretaris Transportasi Sean Duffy dan FAA, penyebabnya adalah gangguan telekomunikasi yang membebani sistem komunikasi air traffic control yang sudah tua (legacy system). Switch dan router dilaporkan overload sehingga data menjadi tidak konsisten. Homeland Security Secretary Markwayne Mullin menegaskan tidak ada indikasi serangan atau ancaman keamanan, dan semua penerbangan sudah terhitung aman. Ground stop kemudian dicabut sekitar pukul 20.15 EST, meski dampaknya masih terasa di akhir pekan.

Klaim UFO Beredar di Media Sosial

Di tengah kekacauan bandara, sejumlah unggahan di platform seperti X (Twitter) dan forum online mulai menyebarkan klaim bahwa grounding terkait dengan penampakan UFO atau UAP (Unidentified Anomalous Phenomena). Beberapa video viral menampilkan objek terbang tidak dikenal di atas kota atau bandara, termasuk klaim penampakan “armada UAP” di New York yang dikaitkan dengan penghentian penerbangan.

Namun, klaim tersebut tidak didukung bukti resmi. Fact-check dan laporan otoritas penerbangan menyebut tidak ada koneksi antara gangguan ATC dengan penampakan UFO. Insiden serupa di masa lalu (seperti penampakan di O’Hare 2006 atau laporan pilot di New Mexico) biasanya dijelaskan sebagai fenomena cuaca, drone, atau objek biasa, dan tidak pernah menyebabkan grounding nasional.

Dampak dan Reaksi

Bandara-bandara besar seperti JFK, Reagan National, dan lainnya dipenuhi penumpang yang terlantar. Maskapai seperti United, American, Delta, dan Southwest membatalkan ratusan penerbangan. Analis memperkirakan gangguan jadwal akan berlangsung beberapa hari ke depan.

Sementara itu, spekulasi UFO terus beredar di media sosial, memicu diskusi antara yang percaya ada “cover-up” dan yang menilai ini hanya teori konspirasi biasa di tengah masalah teknis sistem ATC yang sudah lama dikritik usang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

3 BERITA

OPINI

Ketika Rasio Melayani Identitas: Membaca Loyalitas Pendukung Jokowi

Oleh Lukman Nul Hakim · 14 Nov, 14.10 WIB



Ilustrasi mendalam yang menggambarkan kompleksitas lanskap politik Indonesia dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Gambar ini menyoroti keterkaitan antara kepemimpinan, arus informasi, dan identitas sosial.

Oleh: Dr. Lukman Nul Hakim((Dr. Lukman Nul Hakim adalah ilmuwan psikologi dan pengajar kepemimpinan dan manajemen pendidikan))

AMIS, 12 November 2026, menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR. Ia menjadi wakil presiden pertama sejak Reformasi 1998 yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai.

Langkah tersebut diambil setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menganulir keabsahan dokumen penyetaraan ijazah sekolah menengahnya, yang ia tempuh di luar negeri. Padahal, dokumen itu merupakan syarat pencalonan wakil presiden. Wacana pemakzulan pun mulai bergulir di parlemen. Dalam pernyataan perpisahannya, Gibran menegaskan bahwa keputusan itu bersifat pribadi, tidak berkaitan dengan ijazah, dan seluruh dokumen pendidikannya lengkap.

Menurut saya, peristiwa ini tidak cukup dibaca sebagai nasib seorang Gibran. Gibran merupakan representasi "geng Solo", yaitu jejaring keluarga, relawan, dan loyalis yang tumbuh bersama karier politik Joko Widodo sejak ia menjadi wali kota Solo, lalu ikut naik ke panggung nasional. Jalan Gibran ke kursi wakil presiden pun dibuka oleh Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tentang syarat usia, ketika MK dipimpin Anwar Usman, ipar Jokowi, yang belakangan dinyatakan melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK. Dari Balai Kota Solo ke Istana, perjalanan Gibran memperlihatkan bagaimana kekuasaan keluarga dirawat dan diwariskan.

Saya mengira publik akan menimbang ulang dukungannya kepada "geng Solo" setelah serangkaian kontroversi selama satu dekade terakhir, seperti revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah, UU Cipta Kerja yang sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, hingga Ibu Kota Nusantara yang kajian lingkungannya baru disusun setelah keputusan politik diambil. Kereta cepat Whoosh, yang semula dijanjikan tanpa uang negara, kini meninggalkan utang lebih dari Rp116 triliun, dan pemerintah mulai menimbang APBN untuk menanggungnya. Bandara Kertajati bahkan diakui pemerintah sendiri sebagai proyek gagal karena sepi penumpang. Puncaknya, putusan MK tentang syarat usia mengubah tafsir UU Pemilu dan meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Akan tetapi, semua itu nyaris tidak menggerus kecintaan banyak warga kepada Jokowi dan keluarganya.

Hal ini tampak jelas di kolom komentar unggahan Instagram Narasi Newsroom yang berjudul "Gibran: Keputusan Mundur Ini Tidak Berkaitan dengan Ijazah".

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Sepertinya Jokowi dan Gibran Mulai Memainkan Strategi Blankon?

Oleh Redaksi · 14 Nov, 12.33 WIB



Oleh: Rosadi Jamani((Penulis adalah Ketua Satu Pena Kalimantan Barat))

IBRAN end game alias tamat. Pembela garis kerasnya Andi Azwan dan Ade Darmawan pun pindah tuan. Mestinya Gibran dan Jokowi menjadi oposisi, nyata malah makin mendukung Prabowo.

Apakah ayah dan anak ini sedang memainkan Strategi Blankon?

Simak ulasannya sambil seruput Koptagul, wak!

Inilah manuver Politik menarik untuk dibedah.

Setelah Gibran ditendang dari istana, Jokowi dan putranya justru menyatakan tetap mendukung Prabowo.

Gibran bahkan meminta para pendukungnya mengawal pemerintahan Prabowo sampai 2029.

Sekilas, keduanya seperti pendekar kalah perang mendatangi markas lawan sambil membawa parcel, bunga, dan kartu ucapan, “Kami tetap mendukung Bapak sampai akhir masa jabatan.”

Tetapi jangan buru-buru percaya. Dalam politik, senyum tidak selalu berarti persahabatan. Kadang senyum adalah pagar betis bagi kepentingan yang belum selesai. Saya menyebutnya strategi blankon.

Blankon merupakan penutup kepala tradisional Jawa. Di depan terlihat santun dan bersahaja, di belakang tangan mengepal. Mulut mengucapkan dukungan, kepala tetap sibuk menghitung strategi. Jangan-jangan yang bekerja bukan sekadar otak, melainkan kalkulator politik bertenaga nuklir.

Mengapa Jokowi tidak langsung menjadi oposisi? Mengapa Gibran tidak mengajak pendukungnya berseberangan dengan Prabowo?

Sederhana. Berkelahi terbuka dengan presiden yang menguasai pemerintahan, Gerindra, koalisi, dan akses kekuasaan bukan seperti menantang tetangga bermain catur di warkop. Salah melangkahkan gajah, langsung diseruduk benteng, eh salah, menteri dari samping kanan. Terlempar dari papar catur.

Ada pula urusan keluarga tidak bisa diabaikan. Jokowi, ayah. Gibran, anak. Orang tua mana tidak terusik ketika anaknya tersingkir dari panggung kekuasaan? Anak dahulu didorong masuk gelanggang dengan menghalalkan segala cara, terlempar dari panggung kekuasaan. Kalau ini drama keluarga, penonton menyiapkan tisu. Kalau ini politik, penonton justru harus menyiapkan kalkulator.

Namun, perasaan seorang ayah tidak otomatis menjadi bukti adanya rencana perlawanan. Bisa saja Jokowi memilih menahan ekspresi, menjaga hubungan, dan memastikan pintu politik keluarganya tidak tertutup. Dalam politik, sakit hati pun kadang harus memakai jas, berdasi, lalu tersenyum di depan kamera.

Maka, pilihan paling lihai adalah jangan terlihat sebagai ancaman. Di depan kamera, katakan mendukung Prabowo. Jangan bikin gaduh. Jangan keluarkan ultimatum. Kalau perlu, kirim karangan bunga setiap ada acara kenegaraan. Bunganya boleh mawar, tetapi durinya jangan dibuang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Oleh Redaksi · 14 Nov, 08.40 WIB



0leh:Rosadi Jamani

REPUBLIK ini memang ajaib, wak. Politik kita bukan lagi seperti permainan catur, tetapi seperti acara pencarian jodoh. Baru saja satu pasangan berpisah, eh, mak comblang sudah sibuk menawarkan calon pengantin berikutnya. Gibran Rakabuming Raka mundur, relawannya malah melirik Sufmi Dasco Ahmad. Astaga! Ini relawan atau peserta lomba pindah ke lain hati?

Kemarin, Ade Darmawan begitu gagah membela Gibran. Kalau ada mengkritik, pembelaannya bisa menggetarkan genteng Istana. Argumentasinya menggelegar, seolah-olah Gibran bukan sekadar Wapres, melainkan anak semata wayang republik harus dijaga dari serangan meteor.

Namun, Kamis, 12 November 2026, setelah Gibran mundur dari jabatan Wapres, muncul episode baru. Ade Darmawan bersama Andi Azwan menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon pengganti Gibran.

Ade menyebut, “Kami mendukung satu nama, Bang Dasco.”

Waduh! Cepat sekali. Gibran belum selesai mengemas kenangan, relawannya sudah membuka aplikasi pencarian tuan baru. Kalau begini, jasa pindahan harus memberikan diskon khusus untuk relawan politik.

Tenang, jangan salah paham. Mereka menyatakan dukungan itu merupakan inisiatif sendiri, bukan perintah Gibran maupun Jokowi. Jadi, tidak ada instruksi dari mantan junjungan. Mereka bergerak mandiri. Barangkali sudah punya radar khusus bisa mendeteksi kursi kekuasaan dari jarak 5.000 kilometer.

Andi Azwan menjelaskan Dasco dianggap sosok tenang, bijaksana, mampu merangkul semua pihak, dan berasal dari partai yang sama dengan Presiden. Menurutnya, Presiden dan Wapres sebaiknya berasal dari partai yang sama agar koordinasi pemerintahan lebih selaras.

Lho, kalau begitu, pemerintahan ini seperti grup WA penyadap. Adminnya harus satu keluarga supaya tidak terjadi perang stiker. Kalau berbeda partai, jangan-jangan Presiden mengirim pesan selamat pagi, Wapres membalas dengan emoji durian.

Tetapi, Dasco sendiri belum tentu mau. Ia mengatakan pembicaraan soal pengganti Wapres masih terlalu jauh. Dasco juga membantah kabar dirinya sudah ditunjuk menggantikan Gibran.

Kasihan Dasco. Belum melamar, sudah dipasangkan. Belum membeli cincin, sudah dibuatkan undangan. Calon pengantin masih duduk santai, mak comblang sudah menyewa gedung.

Perlu diingat, penggantian Wapres tidak semudah mengganti baterai remote televisi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.

Jadi, dukungan relawan belum menjadikan Dasco calon resmi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

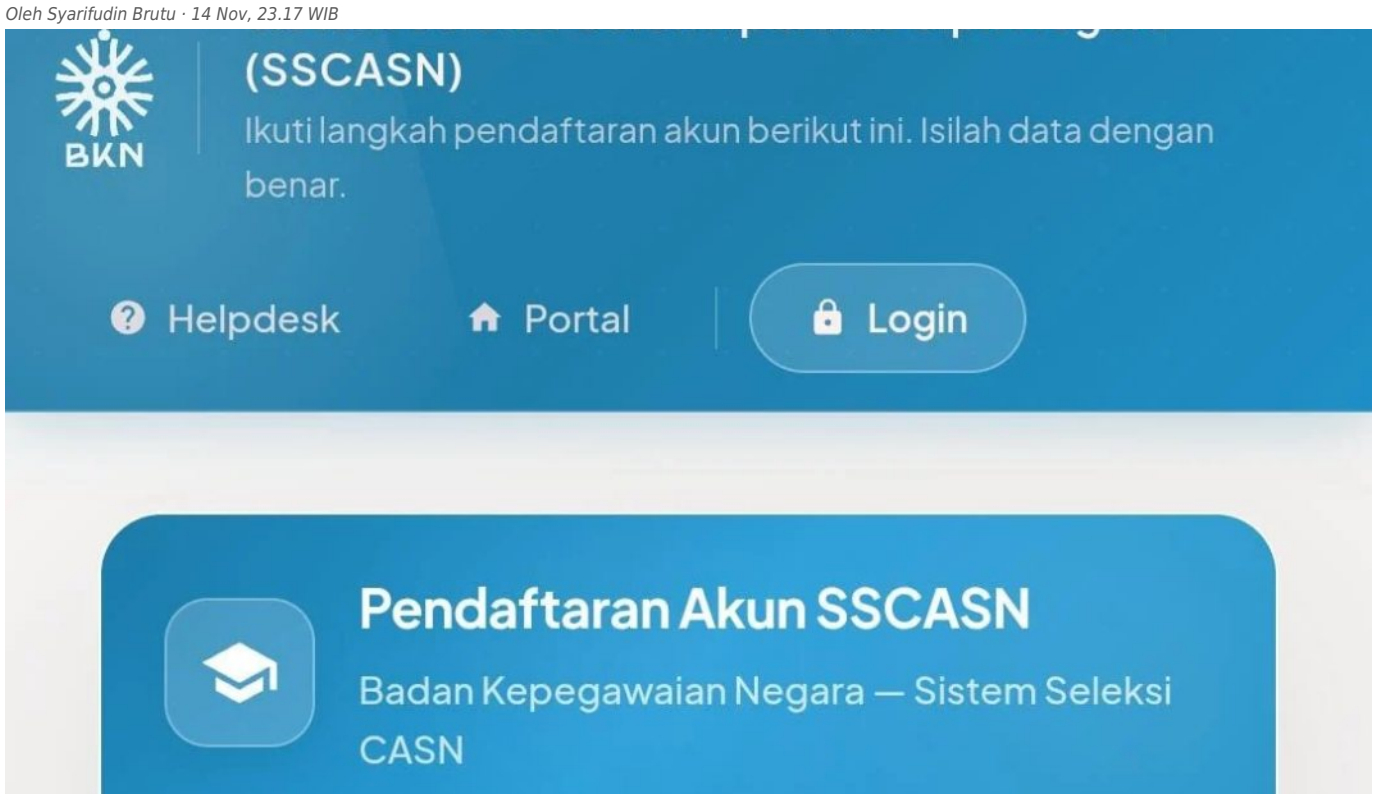
ANEKA BERITA

4 BERITA

LAPANGAN PEKERJAAN

Akun SSCASN CPNS 2026 Resmi Dibuka, Begini Syaratnya!

Oleh Syarifudin Brutu · 14 Nov, 23.17 WIB



Tangkapan layar formulir pendaftaran akun SSCASN BKN untuk seleksi CPNS 2026

Peluang emas bagi masyarakat yang mendambakan status sebagai aparatur sipil negara akhirnya tiba melalui pembukaan rekrutmen pegawai negeri sipil tahun ini. Pemerintah secara proaktif merancang agenda penerimaan tenaga kerja baru yang dijadwalkan bergulir mulai bulan kesebelas tahun 2026.

Merujuk informasi dari kalangan internal pendidikan, Badan Kepegawaian Negara secara resmi mengonfirmasi bahwa seluruh peminat sudah diizinkan melangsungkan proses registrasi profil digital lebih awal. Kebijakan ini dihadirkan agar peserta bisa mencicil persiapan sebelum pengumuman detail mengenai lini masa pendaftaran serta rincian formasi diluncurkan ke publik.

Portal registrasi tersebut berfungsi sebagai gerbang utama bagi setiap individu yang ingin mengadu nasib dalam seleksi abdi negara. Melalui platform terpusat ini, para pendaftar nantinya diwajibkan memasukkan data pribadi, memilih posisi pekerjaan yang diincar, serta mengunggah berkas-berkas administratif secara digital.

"Segera Dibuka! Seleksi CASN 2026. Pembuatan akun sudah dibuka sscasn.bkn.go.id," demikian bunyi seruan tertulis yang disiarkan langsung melalui saluran resmi instansi kepegawaian pada Sabtu, 14 November 2026.

Lantas, perangkat apa saja yang harus dipersiapkan serta bagaimana tahapan teknis untuk merampungkan registrasi profil digital tersebut?

Dokumen Esensial Pendaftaran Akun SSCASN CPNS 2026

Sebelum mengakses laman registrasi, setiap kandidat diwajibkan mengumpulkan berkas serta informasi personal berikut guna memperlancar pengisian data:

- Identitas nama lengkap yang selaras dengan Kartu Tanda Penduduk.
- Keterangan titik serta waktu kelahiran merujuk dokumen identitas resmi.
- Angka unik Nomor Induk Kependudukan.
- Kode digit resmi Nomor Kartu Keluarga.
- Dokumen fisik Kartu Tanda Penduduk.
- Saluran komunikasi berupa nomor telepon seluler aktif.
- Alamat surat elektronik pribadi yang dapat diakses.
- Berkas visual berupa pasfoto formal maupun swafoto mutakhir.
- Bukti kelulusan berupa ijazah atau transkrip nilai jenjang pendidikan terakhir.

Panduan Teknis Pembuatan Akun SSCASN CPNS 2026

Ikuti urutan prosedur operasional berikut untuk merampungkan pembuatan profil pada portal seleksi nasional:

- Kunjungi situs resmi portal layanan terpadu melalui tautan https://sscasn.bkn.go.id.
- Cari dan klik menu berlabel "Buat Akun" untuk mengawali tahapan pendaftaran.
- Masukkan seluruh elemen identitas diri secara rinci, mencakup nama sahih, NIK, nomor keluarga, jenis kelamin, informasi lahir, domisili, kontak seluler, hingga surel.
- Masukkan kode verifikasi keamanan atau captcha yang muncul di layar monitor.
- Ketikkan riwayat jenjang pendidikan terakhir yang nantinya menjadi basis penentuan formasi pekerjaan.

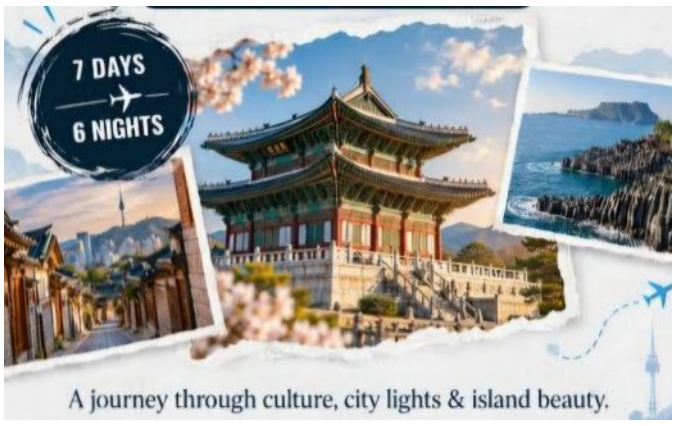
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Geger! Ada Paket Liburan ke Korea Cuma Seharga Rp544 Ribu

Oleh Redaksi · 14 Nov, 12.28 WIB



BANDA ACEH - Publik dihebohkan dengan maraknya penawaran murah terkait paket liburan selama lima hari ke Korea Selatan. Bagaimana tidak mengejutkan, paket ini dibanderol dengan harga sangat tidak masuk akal mulai dari US$45 (sekitar Rp816 ribu), dengan uang muka hanya CNY199 atau setara Rp544 ribu.Dikutip Sabtu (14/11/2026) China tengah dibanjiri penawaran paket liburan murah, namun harga super miring tersebut rupanya menyimpan jebakan di baliknya yang bahkan membuat turun tangan pihak dari Kedutaan Besar China di Seoul.

Menurut laporan, turis dari negara tersebut dihimbau agar cermat memilih agen perjalanan dan mewaspadai paket murah yang berujung pada pemaksaan wisata belanja hingga pemangkasan jadwal kunjungan apabila nilai belanja dianggap kurang.

Pasalnya, pernah terjadi kejadian dimana turis dari negara itu ditelantarkan cukup lama oleh agen perjalanannya di depan sebuah toko bebas pajak di Seoul. Hal tersebut terjadi karena menolak berbelanja, hingga memaksa pihak kepolisian turun tangan.

Kasus serupa juga dilaporkan pada 13 Juli 2026. Pada waktu itu, seorang wisatawan mengeluhkan jatah makan siang dan transportasi pulangnya ditahan akibat nilai belanja rombongan yang rendah.

Fenomena ekstrem ini dipicu oleh membeludaknya arus wisatawan dari China ke Korea Selatan. Ia diketahui mencapai 5,47 juta perjalanan dalam sembilan bulan pertama tahun 2026. Hal tersebut tersebut didorong oleh kebijakan bebas visa bagi rombongan turis dari negara itu sejak akhir September 2025.

Ketatnya persaingan memperebutkan pasar membuat banyak agen nekat menjual paket di bawah modal, sebuah praktik yang dikenal sebagai tur dumping.

Sejumlah Agen Korea bahkan berani membayar operator agar mau mengirimkan rombongan, serta melakukan praktik "pinjam nama" dengan tarif ₩2.000 (kurang dari Rp30 ribu) per turis demi memakai status izin agen resmi. Kerugian dari murahnya harga paket tersebut kemudian ditutup dengan memaksa turis berbelanja di toko-toko pemberi komisi.

Pemerintah Kota Seoul merespons hal tersebut telah menginspeksi 100 paket tur termurah dari total 3.097 paket yang dijual di empat platform daring besar di China. Mereka menemukan 85 di antaranya terindikasi sebagai tur dumping. Seoul pun meminta pemerintah setempat untuk melarang puluhan produk wisata tersebut.

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea juga mencabut izin operasional satu agen pada beberapa bulan lalu karena menelantarkan turis dan merusak ketertiban industri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Kampanye “Be Ready” Melanda Dunia, Indonesia Bisa Apa?

Oleh Rut sw · 14 Nov, 08.10 WIB



Persiapkan diri Anda menghadapi situasi darurat demi keselamatan bersama. Sudahkah Anda siap hari ini?

AKIL Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menjadi pembicara dalam acara Rembuk Nasional Pemuda Indonesia III di The Tribrata, Jakarta Selatan.

Ia memastikan stok beras nasional aman hingga 10 bulan ke depan. Karena cadangan beras nasional tercatat telah mencapai 4,5 juta ton.

Saleh membandingkan ketahanan pangan Indonesia dengan negara maju seperti Inggris, mengingat baru-baru ini pemerintah Inggris mengimbau warganya untuk menimbun makanan kaleng dan air minum kemasan.

Tepatnya tanggal 26 Oktober, pemerintah Inggris mengeluarkan kampanye kepada masyarakatnya Be Ready, yang mendorong setiap rumah tangga memiliki persediaan untuk bertahan selama 72 jam atau tiga hari.

Selain makanan dan air, warga disarankan menyimpan obat-obatan, uang tunai, senter, baterai cadangan, dan radio darurat.

Persiapan ini ditujukan untuk mengantisipasi gangguan layanan penting akibat cuaca ekstrem, serangan siber, hingga ancaman keamanan terhadap eskalasi konflik atau ancaman dari negara-negara yang bermusuhan.

Kampanye Be Ready menurut Saleh menunjukkan kerentanan pasokan pangan yang bahkan mulai dirasakan oleh negara-negara di kawasan Eropa.

Sebaliknya, Indonesia dinilai lebih siap. Bukan 3 hari tapi selama 10 bulan. Saleh kemudian memuji ini adalah strategi dan gagasan dari Presiden kita yang sangat kita banggakan.

Yang harus diantisipasi dan diwaspadai, menurut Saleh adalah kontrol pangan dunia.

Karena itu, dia terus berkomitmen mewujudkan empat fokus utama, yakni swasembada pangan, pengembangan makanan bergizi, ketahanan energi dan hilirisasi.

Benarkah Indonesia Siap Menghadapi Ancaman Krisis Pangan dan Konstelasi Dunia?

Sebenarnya, kesiapsiagaan atau Be Ready di Eropa sudah digalakkan bertahap melalui kebijakan nasional dan regional, sejak 2019 lalu diperluas ke tingkat Uni Eropa.

Di antaranya seperti Swedia melalui buku panduan “ If Crisis or War Comes” dan Finlandia

Komisi Eropa resmi meluncurkan kampanye “Preparedness Union Strategy” secara komprehensif setelah penyusunan Laporan Niinistö, diusulkan akhir 2024 oleh mantan Presiden Finlandia Sauli Niinistö dan disahkan awal 2025.

Kampanye ini bertujuan menyatukan standar kesiapsiagaan sipil dan militer di seluruh negara anggota EU. Sekaligus membangun kesadaran (awareness) dan mengubah mentalitas masyarakat agar siap menghadapi berbagai krisis tak terduga.

Ancaman utama yang diantisipasi di antaranya adalah ancaman geopolitikdan keamanan misalnya eskalasi konflik di Eropa Timur (seperti perang Rusia-Ukraina) hingga kelangkaan pasokan air atau energi dan rantai pasokan obat-obatan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Ramai Disebut Simpanan Desta, Anindya Salsa Beri Klarifikasi

Oleh Redaksi · 14 Nov, 11.10 WIB



BANDA ACEH - Anindya Salsabila Kurnianaga atau yang dikenal sebagai Anindya Salsa akhirnya angkat bicara mengenai kabar hubungan asmara dengan presenter Deddy Mahendra Desta. Melalui pernyataan tertulis yang diunggah di Instagram @anindyasalsa, Rabu (11/11) malam, Anindya menegaskan kedekatannya dengan mantan suami Natasha Rizki tersebut sudah lama berakhir.

Anindya sekaligus meminta publik berhenti mengaitkan namanya dengan berbagai persoalan yang belakangan menyeret Desta ke perbincangan publik.

"Saya ingin meluruskan bahwa kedekatan saya dengan Deddy Mahendra Desta sudah berakhir sejak tahun 2024," tulis Anindya dalam pernyataannya.

Ia menjelaskan, kedekatan mereka terjalin setelah Desta resmi bercerai. Namun, sejak 2024, keduanya disebut sudah menjalani kehidupan masing-masing dan tidak lagi memiliki keterikatan dalam bentuk apa pun.

Tak hanya soal hubungan personal, Anindya juga secara khusus membantah keterlibatannya dalam urusan pekerjaan, profesional, maupun persoalan yang saat ini menjadi pembicaraan publik terkait Desta.

"Saya juga ingin menegaskan bahwa saya tidak memiliki keterlibatan dengan urusan pekerjaan, profesional, maupun persoalan yang saat ini sedang menjadi pembicaraan publik," tegasnya.

Anindya mengaku memahami setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing. Namun, ia tidak bermaksud membela ataupun menyudutkan siapa pun melalui klarifikasi tersebut.

Ia hanya berharap namanya tidak lagi dikaitkan dengan persoalan yang berada di luar keterlibatannya.

"Saya hanya berharap tidak ada lagi kesalahpahaman atau pengaitan nama saya dengan hal-hal yang berada di luar keterlibatan saya," ungkapnya.

Sebelumnya, nama Anindya kembali ramai diperbincangkan setelah foto kebersamaannya dengan Desta beredar lagi di media sosial.

Sejumlah warganet kemudian mengaitkan foto tersebut dengan isu kedekatan mereka yang sempat mencuat pada 2025.

Situasi itu semakin menjadi perhatian ketika Desta tengah menghadapi sorotan publik terkait polemik kerja sama The Dudas Minus One dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Desta sendiri telah memberikan klarifikasi mengenai persoalan pekerjaan tersebut melalui Instagram.

Ia bersama Ariel NOAH dan Gading Marten juga menjelaskan bahwa kerja sama mereka mencakup berbagai keluaran pekerjaan, bukan sekadar satu konten.

Melalui klarifikasinya, Anindya berharap persoalan tersebut tidak lagi menyeret kehidupan pribadinya. Ia menutup pernyataan dengan ucapan terima kasih atas pengertian publik.

REDAKSI

PENERBIT: PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA: Adam
REDAKTUR: Hayat
SEKRETARIS REDAKSI: Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin